

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan, lalu dirumuskan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Natalia & Maulidya, 2023). SDGs dibentuk pada 25 September 2015 yang tertulis pada resolusi PBB No. A/RES/70/1. dimana SDGs ini memiliki jangka waktu 15 tahun, sehingga akan berakhir pada Tahun 2030. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan tujuan pembangunan milenium yang dikenal dengan nama MDGs atau *Millennium Development Goals*, program tersebut berakhir pada tahun 2015. SDGs dalam hal ini merupakan wujud dari suatu komitmen bersama dalam suatu agenda pembangunan dunia dan nasional yang mencakup 17 tujuan utama dengan 169 target sasaran. Bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti: (1) Tanpa Kemiskinan; lalu (2) Tanpa Kelaparan; kemudian (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; selanjutnya (4) Pendidikan Berkualitas; lalu (5) Kesenjangan Gender; selanjutnya (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; kemudian (7) Energi Bersih dan Terjangkau; lalu (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; selanjutnya (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; lalu (10) Berkurangnya Kesenjangan; kemudian (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; selanjutnya (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; lalu (13) Penanganan Perubahan Iklim; kemudian (14) Ekosistem Lautan; selanjutnya (15) Ekosistem Daratan; kemudian (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; selanjutnya tujuan terakhir yaitu (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Wijayati, 2024).



Gambar 1. 1 The Global Goals For Sustainable Development

Sumber: Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, 2024

Pembentukan *Sustainable Development Goals* (SDGs) muncul dari kesadaran global bahwa setiap negara butuh pembangunan yang berkelanjutan, berarti pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus tetap menjaga kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Indonesia sendiri menunjukkan komitmen kuat terhadap SDGs. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpres ini menjadi dasar hukum pengesahan dan pelaksanaan SDGs di Indonesia serta menegaskan integrasinya ke dalam arah pembangunan nasional. Melalui regulasi ini, pemerintah mengatur kerangka koordinasi dan pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pencapaian tujuan SDGs, sehingga agenda pembangunan

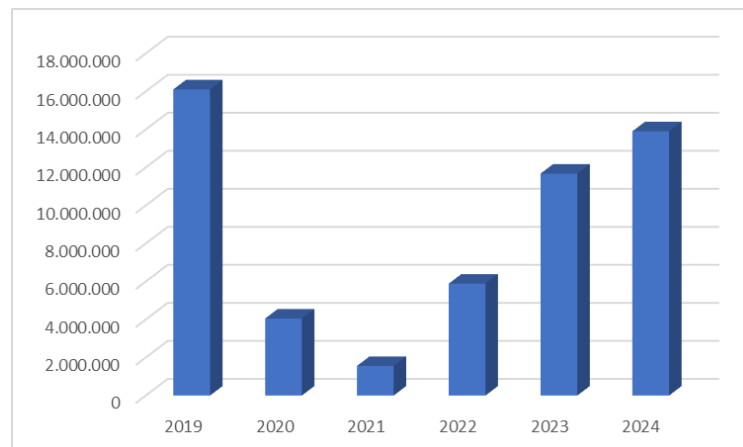
berkelanjutan dapat dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara (Wibowo et al., 2017). Selain berperan sebagai sumber devisa negara, sektor pariwisata juga membuka banyak peluang kerja, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya dan lingkungan. Di tengah era globalisasi yang ditandai dengan persaingan ketat antar destinasi wisata, dibutuhkan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan serta inovatif agar tetap mampu bersaing. Oleh karena itu, strategi pengembangan pariwisata harus selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Hakim et al., 2024). Jika ditinjau dari 17 tujuan SDGs, sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (tujuan 1), serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif (tujuan 8). Pariwisata berperan dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Hal tersebut konsisten dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menekankan bahwa pada sektor pariwisata berfungsi dalam meningkatkan pendapatan negara, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

SDGs Desa merupakan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang dikembangkan dan dibina oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sebagai upaya menerjemahkan agenda SDGs nasional ke dalam konteks desa. Kebijakan ini disusun untuk

menjawab berbagai persoalan pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta ketahanan desa terhadap risiko bencana. Sejumlah permasalahan desa yang menjadi fokus SDGs Desa memiliki keterkaitan langsung dengan SDGs 12, terutama dalam mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Selain itu, SDGs Desa juga beririsan dengan SDGs 13, yang meskipun berorientasi pada isu perubahan iklim, di tingkat desa lebih diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi dampak bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan masyarakat desa.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab melalui berbagai upaya, salah satunya dengan mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki 17.504 pulau, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia dimana tersebar pada 38 Provinsi (Rahma, 2020). Indonesia dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan dunia karena keindahan alamnya yang autentik dan eksotis (Nugrayasa, 2025). Selain pesona alam, keberagaman budaya serta keramahan masyarakat juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara (Rahma, 2020). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 1.300 suku yang beragam dalam bahasa, agama, dan tradisi. (Aziz et al., 2018). Kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun ini, berpadu dengan keindahan alam, menjadikan Indonesia magnet utama pariwisata

dunia. Kehadiran wisatawan mancanegara pun tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.



Gambar 1. 2 Kunjungan Wisata Mancanegara ke Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2019 jumlah tercatat 16.106.954. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam menjadi 4.052.923, atau turun sekitar 74,8% dibanding tahun sebelumnya. Tren penurunan berlanjut di tahun 2021 dengan jumlah hanya 1.557.530, berarti turun lagi sekitar 61,6% dari tahun 2020, dan menjadi angka terendah dalam periode ini. Mulai tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan jumlah meningkat menjadi 5.889.031, naik sekitar 278% dibandingkan tahun 2021. Pemulihan terus berlanjut di tahun 2023 dengan angka 11.677.825, atau naik sekitar 98,3% dari tahun 2022. Pada tahun 2024 jumlahnya kembali meningkat menjadi 13.902.420, bertambah sekitar 19% dari tahun 2023. Perubahan jumlah kunjungan wisatawan ini tentu berpengaruh langsung terhadap devisa negara. Pada masa penurunan tajam 2020–2021, devisa dari sektor pariwisata juga ikut merosot signifikan akibat minimnya kunjungan wisatawan mancanegara.

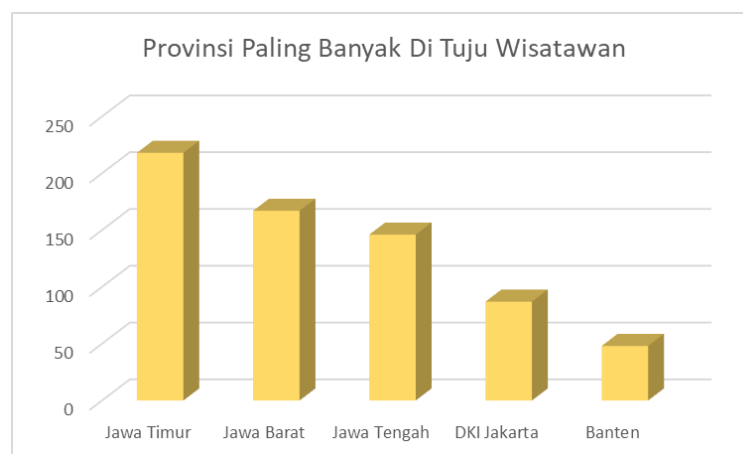


Gambar 1. 3 Perkembangan Jumlah Devisa Pariwisata Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selain jumlah kunjungan wisatawan, data devisa pariwisata juga menunjukkan tren yang sejalan. Pada tahun 2019, devisa pariwisata Indonesia mencapai 16,91 miliar US\$, sebelum merosot tajam pada tahun 2020 menjadi hanya 3,38 miliar US\$ atau turun sekitar 80%. Kondisi semakin memburuk di tahun 2021 dengan devisa hanya 0,52 miliar US\$, turun lebih dari 84% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadi titik terendah selama periode ini. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan, devisa pariwisata mulai pulih pada tahun 2022 dengan perolehan 6,78 miliar US\$, atau naik lebih dari 1.200% dari tahun 2021. Pemulihan berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 14 miliar US\$, naik sekitar 106%. Pada tahun 2024, devisa kembali meningkat menjadi 16,71 miliar US\$, hampir menyamai capaian tertinggi pada 2019. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa pariwisata berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara. Wisatawan dari negara-negara tersebut umumnya tertarik dengan berbagai destinasi unggulan seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta serta banyak lokasi wisata alam dan budaya di wilayah lain, seperti di provinsi Jawa Tengah.

Dengan area sekitar 34.548 km², Provinsi Jawa Tengah menawarkan banyak pilihan wisata. Geografis, daerah ini berada di tengah Pulau Jawa dan berbatasan dengan Jawa Barat di bagian barat, Jawa Timur di bagian timur, Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan, dan Laut Jawa di bagian utara. (Mustofa & Haryati, 2018). Jawa Tengah telah menjadi salah satu tempat wisata yang paling mudah diakses dari berbagai wilayah Indonesia.



Gambar 1. 4 Provinsi Paling Banyak Dikunjungi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2024, Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu tujuan utama perjalanan wisatawan nusantara dengan jumlah 146,84 juta perjalanan, setara 14,38 persen dari total perjalanan di Indonesia. Dengan jumlah ini, Jawa Tengah menempati peringkat ketiga, hanya di belakang Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Tidak hanya pencapaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki daya tarik pariwisata yang kuat, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan wisata domestik Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Provinsi Jawa Tengah 2021-2023

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Domestik	21.332.409	46.465.437	56.485.087	68.887.558
Wisatawan Mancanegara	1.793	144.691	464.719	593.168
Jumlah Wisatawan	21.334.202	46.610.128	56.949.806	69.480.726

Sumber: Disporapar Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Tengah telah meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir, menurut data yang tersedia. Wisatawan domestik yang pada tahun 2021 tercatat 21.332.409 orang, meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2022 menjadi 46.465.437 orang, dan terus naik pada 2023 mencapai 56.485.087 orang (BPS, 2024). Pada 2024, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 68.887.558 orang. Sementara itu, wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan, meskipun jumlahnya masih jauh lebih kecil dibanding wisatawan domestik. Dari hanya 1.793 orang pada 2021 akibat dampak pandemi, jumlah wisatawan mancanegara melonjak menjadi 144.691 orang pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi 464.719 orang di 2023, dan mencapai 593.168 orang pada 2024. Secara keseluruhan, pada 2024 jumlah wisatawan di Jawa Tengah tercatat 69.480.726 orang. Peningkatan tersebut membawa pengaruh positif terhadap perkembangan sektor pariwisata serta perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan usaha perhotelan, transportasi, kuliner, serta industri kreatif. Selain itu, persebaran wisatawan di 35 kabupaten/kota turut mendorong peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat.



Gambar 1. 5 Total Pendapatan di Jawa Tengah

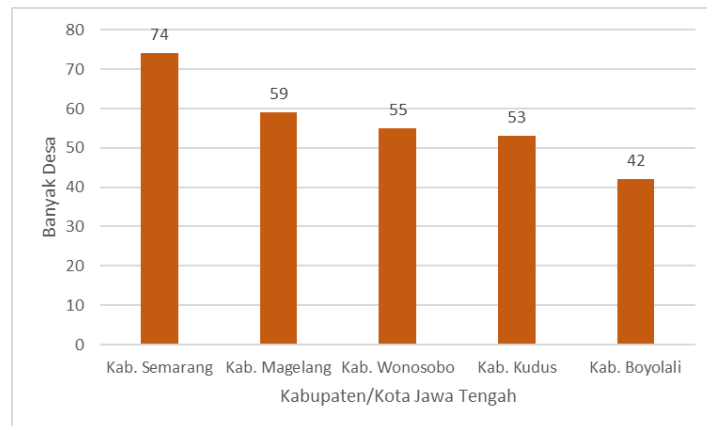
Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2022

Berdasarkan grafik uraian tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan yang berasal dari objek daya tarik wisata dari tahun ke tahun, Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. 2021 hingga 2024. Dimana tahun 2021, pendapatan masih berada di angka Rp145 miliar, kemudian melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2022 menjadi Rp344 miliar. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2023 dengan capaian Rp465 miliar, dan kembali meningkat pada tahun 2024 meskipun kenaikannya tidak terlalu besar, yaitu mencapai Rp492 miliar. Dari tren ini, bisa kita lihat bahwa sektor pariwisata di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif, terutama pasca pandemi yang sebelumnya sempat menurunkan aktivitas wisata. Lonjakan tajam pada tahun 2022 menandakan adanya pemulihan dan peningkatan minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun, di tahun 2024 laju pertumbuhan mulai melambat, yang bisa jadi menandakan bahwa sektor ini mulai memasuki fase stabil.

Pengembangan sektor pariwisata di Jawa Tengah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa

Wisata. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam memaksimalkan potensi pariwisata, terutama di tingkat desa sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, desa wisata menjadi prioritas pembangunan pariwisata melalui program pendampingan, pelatihan, hingga penyediaan infrastruktur. Pada semester I tahun 2022, jumlah desa wisata di Jawa Tengah meningkat dari 717 desa menjadi 818 desa, atau bertambah sebanyak 101 desa (jatengprov.go.id). Kehadiran desa wisata ini terbukti mampu mendorong kebangkitan kembali perekonomian masyarakat setelah pandemic virus Covid-19. Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan nyata berupa peningkatan sarana prasarana, penguatan SDM, hingga penyaluran dana stimulan melalui bantuan keuangan bagi ratusan desa wisata (Disporapar Jawa Tengah, 2023). Perda tersebut menegaskan bahwa pengembangan desa wisata dilaksanakan oleh pengelola setempat dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha melalui penerapan prinsip sinergi, integrasi, dan koordinasi.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Semarang secara berkelanjutan mengembangkan sektor pariwisatanya. Wilayah ini dikenal memiliki banyak desa wisata dengan potensi alam, budaya, maupun kreativitas masyarakat lokal yang menarik untuk dikunjungi. Potensi tersebut tidak hanya memberi nilai tambah bagi sektor pariwisata, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta pendapatan daerah.



Gambar 1. 6 Kabupaten Di Jawa Tengah Dengan Desa Desa Wisata Terbanyak

Sumber: Disporapar Jawa Tengah, 2023

Kabupaten Semarang dikenal sebagai wilayah dengan pertumbuhan desa wisata paling pesat di Provinsi Jawa Tengah, yakni mencapai 143,33% dalam periode 2018–2022. Dimana berdasarkan data, Desa Wisata di Kabupaten Semarang sudah mencapai 74 Desa. Lonjakan tersebut menjadikan Kabupaten Semarang sebagai wilayah dengan desa wisata terbanyak di provinsi ini, diikuti oleh Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 1. 2 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wisatawan Domestik	3.502.729	1.872.938	1.451.670	3.848.846	3.531.786
Wisatawan Mancanegara	7.560	856	217	1.123	2.344
Total Kunjungan	3.510.289	1.873.794	1.451.887	3.849.969	3.534.130
Pertumbuhan kunjungan wisata	18,41	-46,62	-22,52	165,17	-8,20

Sumber: RKPD Kabupaten Semarang, 2025

Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang meningkat signifikan hingga melampaui jumlah sebelum pandemi Covid-19. Meski pada 2023 pertumbuhannya turun 8,20% karena lonjakan pada tahun sebelumnya, jumlah wisatawan terus meningkat, dengan total 3.534.130 kunjungan, 3.531.786 dari domestik dan 2.344 dari luar negeri, atau 91,80% dari capaian tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang masih menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah.

Untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Semarang, pemerintah setempat menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2020–2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, yang memuat strategi pengembangan berbasis pariwisata, industri, dan pertanian secara terpadu. Selain itu, langkah konkret penguatan pariwisata desa diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 556/0217 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menjadikan desa wisata sebagai penggerak utama perekonomian lokal sekaligus wadah pelestarian budaya dan lingkungan. Desa Wisata Kalongan, yang terletak di Kecamatan Ungaran Timur, adalah salah satu desa wisata yang sedang menjadi perhatian dan banyak diminati wisatawan di Kabupaten Semarang.

Dengan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0217/2020, Desa Kalongan diresmikan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang. Penelitian ini memilih Desa Wisata Kalongan sebagai objek kajian karena statusnya yang masih baru sebagai desa wisata dan belum berkembang secara maksimal.

Jumlah kunjungan wisatawan juga masih tergolong rendah. Tahun 2020 hingga 2023 Desa Kalongan menempati Desa Rintisan dengan 67 Desa Wisata yang ada di Kabupaten Semarang, akan tetapi tahun 2024 Desa Wisata Kalongan naik satu tingkat menjadi Desa Berkembang (Dispar, 2025). Desa ini memiliki potensi wisata unggulan yang menggabungkan keindahan alam serta nilai budaya yang khas dan berbeda dari destinasi lain. Secara administratif, Desa Kalongan terdiri dari 12 dusun, 20 RW, dan 105 RT dengan luas wilayah sekitar 863,3 hektar (Website Profil Kalongan, 2025). Letaknya cukup strategis karena hanya berjarak 5,7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, sehingga akses menuju lokasi relatif mudah. Beberapa tempat dari destinasi wisata pada Desa Kalongan juga saling berdekatan, misalnya Curug Gending Asmoro, lalu ada Pasar Sawahan, juga ada Khayangan Tebing Alfath, Wisata Edukasi Jagad Domba, Sanggar Condro Winoto yang menawarkan pengalaman wisata menarik dan beragam bagi para pengunjung.



Gambar 1. 7 Desa Wisata Kalongan Ungaran Timur

Sumber: Dokumentsi Peneliti, 2025

Desa Wisata Kalongan memiliki sejumlah destinasi unggulan yang mampu menarik perhatian wisatawan. Salah satunya adalah Kayangan Tebing Alfath yang

terkenal dengan panorama tebing indah dan sering menjadi spot favorit untuk berfoto. Selain itu, terdapat Curug Gending Asmara yang menghadirkan suasana alami dengan udara sejuk. Tidak kalah menarik, Cemara Sewu Kalongan menyuguhkan hamparan hutan cemara yang rindang dan menyejukkan, sehingga menjadi tempat yang pas untuk bersantai maupun berfoto. Selain potensi wisata alam, Desa Kalongan juga memiliki daya tarik budaya melalui Pasar Sawahan. Di pasar tradisional ini, wisatawan dapat merasakan suasana khas pedesaan sambil menikmati beragam macam produk lokal sekitar, seperti dari hasil pertanian hingga kerajinan khas masyarakat. Kombinasi antara keindahan alam dan kekayaan budaya inilah yang menjadikan Desa Wisata Kalongan memiliki daya saing tersendiri. Desa Wisata Kalongan terletak di lokasi yang strategis, berdekatan dengan pintu gerbang tol, sehingga memberikan keuntungan unik dan menarik wisatawan. Desa ini berpotensi besar untuk berkembang sebagai destinasi unggulan di wilayah Ungaran Timur.

Pengembangan pariwisata pada desa merupakan salah satu strategi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta melestarikan potensi budaya dan lingkungan. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, kelompok pengelola wisata, masyarakat, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata sangat ditentukan oleh kualitas kerja sama dan proses kolaborasi antaraktor tersebut. Dalam proses pengembangan Desa Wisata Kalongan, terdapat sejumlah hambatan yang masih dihadapi.

Desa Wisata Kalongan memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, baik dari aspek alam, budaya, maupun aktivitas masyarakat lokal. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan belum berjalan secara optimal. Ruang dialog antara pemerintah desa, pengelola desa wisata, pelaku usaha lokal, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta masyarakat telah ada dan pernah dilaksanakan. Dialog tersebut biasanya difasilitasi melalui musyawarah desa, rapat koordinasi pengelola wisata, maupun pertemuan-pertemuan insidental lainnya. Namun, pelaksanaan dialog ini belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Forum komunikasi cenderung hanya diselenggarakan pada momen-momen tertentu, terutama menjelang pelaksanaan *event* wisata, kunjungan tamu penting, atau kegiatan desa berskala besar.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses pertukaran ide, kepentingan, dan aspirasi antaraktor. Aspirasi masyarakat dan pelaku wisata sering kali hanya muncul secara sporadis dan tidak terakomodasi dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang pengembangan desa wisata. Selain itu, hasil-hasil dialog yang telah dilakukan umumnya belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga sulit dijadikan rujukan untuk tindak lanjut kebijakan atau program berikutnya. Akibatnya, berbagai kesepakatan yang pernah dicapai dalam forum dialog sering kali berhenti pada tataran wacana dan tidak berlanjut menjadi aksi konkret yang konsisten. Tidak rutinnya dialog tatap muka juga menyebabkan lemahnya koordinasi dan sinergi antaraktor dalam pengelolaan desa wisata. Setiap pihak cenderung bergerak secara parsial sesuai kepentingannya masing-masing, tanpa adanya forum reguler yang dapat menyelaraskan tujuan dan strategi bersama.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan proses membangun kepercayaan antaraktor. Kepercayaan sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan transparansi informasi dalam pengelolaan desa wisata. Berdasarkan penelitian Cahyaningrum (2021) berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah”, ditemukan bahwa pengelolaan Desa Wisata Kalongan masih menghadapi permasalahan terkait transparansi administrasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya data jelas mengenai jumlah pendapatan, pengeluaran, maupun data kunjungan wisatawan, ditambah dengan keterbatasan kompetensi dalam sumber daya manusia. Selain itu, tidak ditemukan publikasi daring mengenai laporan kegiatan, agenda pengembangan, maupun penggunaan anggaran yang berkaitan dengan desa wisata. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan beberapa informan yang menyampaikan bahwa informasi terkait kegiatan desa wisata lebih banyak disampaikan secara lisan dan terbatas pada lingkup tertentu. Minimnya akses informasi ini berdampak pada rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat serta berpotensi menghambat proses pembangunan kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata desa.



Gambar 1.9 Jalan Longsor di Desa Wisata Kalongan

Sumber:Dokumentasi Penliti, 2025

Permasalahan berikutnya ada pada aspek infrastruktur. Desa Kalongan merupakan daerah yang kerap mengalami gangguan aksesibilitas akibat tanah yang labil dan terus bergerak. Struktur tanah yang tidak stabil membuat wilayah ini sangat rawan longsor, terutama saat musim hujan tiba. sehingga menghambat mobilitas warga dan mengisolasi beberapa kawasan. Dampak dari seringnya longsor ini bukan dirasakan pada penduduk setempat, namun juga oleh para wisatawan yang ingin mengunjungi Kalongan. Infrastruktur yang tidak mendukung tentu berdampak pada rendahnya jumlah kunjungan dan menghambat promosi wisata desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktariani Nadhifah (2024) dengan penelitian “Strategi Pengembangan Desa Wisata Kalongan Pada Objek Wisata Pasar Sawahan dan Tebing Alfath Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”, kepala Desa Kalongan menyatakan bahwasannya “masih mengalami kendala dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan yakni terkait pendanaan serta pemasaran yang masih kurang menarik. Problem utama dari segi sumber daya adalah keterbatasan anggaran. Pengembangan desa wisata tentu membutuhkan pendanaan yang cukup besar, baik untuk pembangunan infrastruktur, promosi, maupun pelatihan sumber daya manusia. Namun, Desa Kalongan masih bergantung pada dana Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan belum banyak mendapatkan dukungan dari sektor swasta melalui investasi. Minimnya modal ini juga berimplikasi pada kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya fasilitas umum, tempat parkir, papan informasi, serta aksesibilitas menuju lokasi wisata yang belum terkelola dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa alokasi

dan mobilisasi sumber daya, baik finansial maupun fisik, masih menjadi kendala utama.

Dari aspek kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan Desa Wisata Kalongan masih belum optimal. Meskipun Desa Kalongan telah ditetapkan sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, implementasi kebijakan tersebut di tingkat lapangan belum berjalan secara maksimal. Dukungan pemerintah berupa program pengembangan, alokasi pendanaan, maupun pendampingan teknis masih tergolong terbatas dan belum berkelanjutan. Selain itu, kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan desa wisata cenderung tidak konsisten, di mana pada tahun tertentu terdapat dukungan anggaran, namun pada tahun berikutnya tidak lagi dianggarkan atau mengalami pengurangan yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pengelola desa wisata dalam merencanakan dan menjalankan program pengembangan jangka panjang. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata daerah belum sepenuhnya berpihak pada desa-desa wisata rintisan seperti Kalongan, padahal peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan arah kebijakan, regulasi yang jelas, serta fasilitasi yang berkesinambungan guna mendorong pengembangan destinasi wisata lokal secara optimal dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas, pemilihan lokus penelitian di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang didasarkan pada belum optimalnya pengembangan Desa Wisata di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam

pengembangan Desa Wisata Kalongan, Kabupaten Semarang yang masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: mengapa proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan Ungaran timur kabupaten semarang kurang optimal?

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Forum Komunikasi belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan hanya diselenggarakan pada momen-momen tertentu
2. Kurangnya kepercayaan antar *stakeholders* disebabkan oleh belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan administrasi.
3. Aksesibilitas menuju lokasi wisata kurang baik.
4. Pendanaan serta pemasaran yang masih kurang menarik
5. Kebijakan pemerintah belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki dampak yang signifikan, dimaksudkan bahwa penjelasan dan analisis yang ditawarkan dalam studi ini akan membantu berbagai pihak baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami pengembangan pariwisata di suatu daerah serta memperluas wawasan dalam bidang administrasi publik, terutama terkait peran para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan pariwisata. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau panduan untuk penelitian di masa depan mengenai topik terkait.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat yang berarti dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, memperdalam pemahaman peneliti melalui pengalaman

empiris, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

1.5.3 Bagi Aktor Pemerintah

Penelitian ini mengenai Pengembangan Pariwisata Melalui *Collaborative Governance* di Desa Wisata Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi seluruh aktor. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tugas dan fungsi para aktor pemerintah terkait, guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

1.5.4 Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata daerah ini, terutama terkait berbagai dinamika dan tantangan yang muncul selama proses pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

1.5.5 Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam perkembangan industri pariwisata lokal. Masyarakat akan lebih memahami kontribusi dan peran berbagai pemangku kepentingan sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan juga

berkolaborasi dengan pemerintah lalu pemangku kepentingan lainnya demi tercapainya tujuan bersama.

1.5.6 Bagi Peneliti

Penelitian akan hal ini berkontribusi dalam memperluas suatu pemahaman juga wawasan mengenai peran pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan para peneliti mampu melakukan analisis serta mengaplikasikan konsep-konsep yang diperoleh secara teoritis selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun Terbit	Teori yang digunakan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Andre Ariesmansyah, R. Hari Busthomi Ariffin, Luthfi Ardhia Respati, <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata, (2023)	<i>Collaborative Governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Ansell dan Gash mengidentifikasi beberapa elemen utama dalam <i>Collaborative Governance</i>, yaitu: • <i>Face-to-Face Dialogue</i> (Dialog Tatap Muka) • <i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan) • <i>Commitment to the Process</i> (Komitmen terhadap Proses) • <i>Shared Understanding</i> (Pemahaman Bersama) • <i>Intermediate Outcomes</i> (Outcome Menengah)	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, belum mencapai keberhasilan yang optimal. Menurut Ansell dan Gash, beberapa indikator kolaborasi pemerintahan yang belum terpenuhi meliputi minimnya aturan resmi yang mengatur kolaborasi, kurangnya kepemimpinan dan struktur organisasi yang jelas, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana-prasarana, serta rendahnya tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan. Selain itu, faktor budaya, institusi, dan politik juga menjadi hambatan dalam tercapainya kolaborasi yang efektif.
2.	Falda Wisnu Ardiansyah, Hartuti Purnaweni, Budi Puspo Priyadi, analisis <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata pantai dewa ruci jatimalang kecamatan purwodadi kabupaten purworejo, (2023)	Menurut Ansell and Gash (dalam Arrozaaq, 2016) dalam teori <i>Collaborative governance</i> merupakan model baru dari strategi pemerintah yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan atau <i>stakeholders</i> untuk bekerja sama dalam satu forum dan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang tidak dapat dihadapi oleh pemerintah.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat pihak bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Mereka adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, pemerintah Desa Jatimalang, Pokdarwis Dewa Ruci, dan bisnis swasta atau restoran. Meskipun kepemimpinan dan kondisi awal kolaborasi telah berjalan dengan baik, masih ada masalah dengan desain

				kelembagaan dan proses kolaboratif. Ini terutama terkait dengan kurangnya komitmen dan kurangnya pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan.
3.	Ahmad Fitra Baiti Rahman, Amil, Ilham Zitri, <i>collaborative governance</i> dalam perkembangan pariwisata di kawasan senggigi kabupaten lombok barat, (2023)	Menurut DeSeve (2009) dalam teorinya disebutkan delapan indikator keberhasilan <i>collaborative governance</i> ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan antaraktor, akses terhadap kekuasaan, pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas, pertukaran informasi, serta ketersediaan dan akses terhadap sumber daya.	Metode Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Kondisi ini terlihat dari struktur jaringan yang masih lemah, dengan partisipasi para aktor terkait dalam kolaborasi yang belum optimal.
4.	Elsa Trisniati, Juliannes Cadith, Kandung Sapto Nugroho, <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, (2022)	Menurut Ansell dan Gash (2008:544), <i>collaborative governance</i> didefinisikan sebagai suatu bentuk tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, deliberatif, serta berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan, program, maupun pengelolaan aset publik.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, penggunaan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung belum berjalan secara efektif. Menurut penelitian ini, masyarakat harus meningkatkan kapasitas mereka dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk lebih bekerja sama. Pemerintah diharapkan untuk mendorong partisipasi dengan memberikan pelatihan berkelanjutan dan membentuk forum khusus untuk berbicara dan berdiskusi tentang visi dan misi pengembangan KEK Tanjung Lesung.
5.	Argyo Demartoto, pengembangan digitalisasi	Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan <i>collaborative governance</i> dapat diukur melalui	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mempercepat digitalisasi pariwisata Kota

	pariwisata berbasis <i>collaborative governance</i> , (2023)	delapan indikator utama, yaitu: struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan antarpartisipan, sistem tata kelola, akses terhadap otoritas, pembagian tanggung jawab atau akuntabilitas, pertukaran informasi, serta ketersediaan dan akses terhadap sumber daya.		Surakarta, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bekerja sama dengan Pandu Digital untuk mengadakan pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Digital Destinasi Pariwisata. Selain itu, tata kelola, infrastruktur transportasi, dan fasilitas pendukung destinasi wisata dibuat lebih baik. Ditunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pariwisata melalui pendekatan <i>collaborative governance</i> memiliki efek positif pada pertumbuhan sektor pariwisata Surakarta.
6.	Dina Gustia Ningsih, Roni Ekha Putera, Yoserizal, <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan pariwisata Geopark Silokekdi Kabupaten Sijunjung, (2023)	Menurut Ansell dan Gash, <i>collaborative governance</i> terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi..	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dalam pengelolaan pariwisata Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung telah berjalan cukup baik. Proses kerja sama ini telah menghasilkan kelompok sadar wisata, meningkatkan jumlah kunjungan, dan membuat wilayah Geopark Silokek menjadi tempat yang indah, yang telah menerima berbagai penghargaan di tingkat nasional. Meskipun demikian, masih ada kekurangan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan dan kemandirian Pokdarwis, yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut.
7.	Kanita, Nina Widowati, Maesaroh. <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan wisata goa	Menurut Ansell dan Gash (2008), <i>collaborative governance</i> adalah bentuk pemerintahan di mana satu atau beberapa lembaga publik secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan formal yang	Metode Penelitian Kualitatif	Berdasarkan temuan penelitian, tata kelola kolaboratif belum diterapkan secara efektif dalam pertumbuhan pariwisata Gua Pindul. Hal ini karena proses kolaboratif masih mengalami kesulitan,

	pindul desa bejiharjo, kecamatan karangmojo, kabupaten gunungkidul, (2023)	berfokus pada konsensus dan musyawarah, dengan tujuan merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik dan mengelola program atau aset publik (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).		terutama dalam menumbuhkan komitmen dan kepercayaan di antara para peserta, serta kepemimpinan fasilitatif masih dalam tahap awal. Unsur budaya mendukung kolaborasi, sedangkan kepentingan pemerintah dan struktur sosial menjadi penghambat.
8.	Ismah Ifaf Agasinta, Ari Subowo, R. Slamet Santoso. analisis <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan objek wisata museum kota lama semarang, (2024)	Menurut Ansell dan Gash (2007), <i>collaborative governance</i> didefinisikan sebagai serangkaian pengaturan yang menghubungkan dan melibatkan para pemangku kepentingan dengan organisasi publik melalui suatu ruang bersama, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan secara kolektif.	Metode Penelitian Kualitatif	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Museum Kota Lama Semarang tergolong cukup, meskipun kelima tahapan proses kolaborasi masih memerlukan perbaikan. Terdapat tiga faktor utama yang belum berjalan dengan optimal, yaitu keanggotaan, komunikasi, dan ketersediaan sumber daya.
9.	Rillia Aisyah Haris, Findriasih, Imam Hidayat. Pengembangan wisata bukit tawapleng-leng dalam perspektif <i>collaborative governance</i> , (2022)	Menurut Ansell dan Gash (2007), <i>collaborative governance</i> dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu: dialog tatap muka (<i>face-to-face</i>), pembangunan kepercayaan (<i>trust building</i>), komitmen terhadap proses (<i>commitment to process</i>), pemahaman bersama (<i>shared understanding</i>), dan pencapaian hasil sementara (<i>intermediate outcomes</i>).	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan pengembangan wisata melibatkan berbagai pihak beserta peran masing-masing. <i>Face-to-face dialogue</i> dilakukan melalui pertemuan rutin sesuai kebutuhan, sementara <i>trust building</i> dibangun melalui pencitraan positif. <i>Commitment to the process</i> diwujudkan dengan memotivasi, meningkatkan komitmen, dan membangun pemahaman bersama. <i>Shared understanding</i> tercapai melalui kesepahaman mengenai tujuan, peran para pemangku kepentingan, serta pembagian keuntungan. Sedangkan <i>intermediate outcomes</i> menunjukkan bahwa pembangunan wisata telah mencapai 50–

				60% dari tahap penyelesaian. Hambatan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam pengumpulan dana untuk proses pembangunan wisata.
10.	Fatmawati, Nur Muqni Melliyan Harahap. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Revitalisasi Wisata Danau Toba Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara, (2024)	Menurut Ansell dan Gash, <i>collaborative governance</i> dipandang sebagai kajian ilmiah dalam kebijakan publik yang menekankan kolaborasi antar berbagai pihak atau aktor. Selain itu, mereka juga menyusun indikator untuk menilai proses kolaborasi, antara lain melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan antaraktor, penekanan pada komitmen bersama, serta pencapaian hasil yang diharapkan.	Metode Penelitian Kualitatif	Studi ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk merevitalisasi Danau Toba melalui investasi, pemasaran, promosi, dan peningkatan kualitas layanan telah berhasil dilaksanakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sektor swasta, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal semuanya telah bekerja sama untuk mewujudkan proses revitalisasi ini.
11.	Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, Ni Wayan Supriliyani. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, (2024)	Menurut Ansell dan Gash (2007:545), <i>collaborative governance</i> adalah bentuk tata kelola di mana aktor publik dan swasta bekerja secara kolektif melalui proses tertentu untuk merumuskan undang-undang dan peraturan dalam penyediaan barang publik.	Metode Penelitian Kualitatif	Menurut temuan studi, kerja sama antara sektor publik dan swasta serta masyarakat berjalan cukup baik, meskipun ada sejumlah hambatan, termasuk dominasi pihak komunitas, kerja sama tanpa perjanjian formal, serta kurangnya dana dan sumber daya manusia. Pemerintah melakukan pengawasan secara lebih rutin, sektor swasta meningkatkan promosi, manajer memperkuat kemampuan layanan pariwisata dan memperluas jaringan kerja sama, penerapan peraturan yang mengikat secara hukum di antara para pemangku kepentingan, serta masyarakat mengambil peran

				lebih aktif dalam pengembangan desa wisata merupakan beberapa saran yang diajukan.
12.	Dynda Safitri Vandayani, Agus Widiyarta. <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (2022)	Berdasarkan konsep kolaborasi yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash sebagaimana dikutip dalam Islamy (2018), <i>Collaborative Governance</i> adalah model tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal. Menurut model kolaborasi Ansell dan Gash, terdapat empat variabel penting yang menentukan keberhasilan kolaborasi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.	Metode Penelitian Kualitatif	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bejijong, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, masyarakat, dan pihak swasta dari Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana semuanya terlibat dalam model kolaboratif untuk pengembangan Desa Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong. Meskipun masih terdapat beberapa masalah dan tantangan yang dapat diatasi agar tidak menghambat kelancaran operasi kolaborasi, proses ini telah berjalan dengan lancar.
13.	Adi Putra, Hasim As'ari, Adianto. <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan objek wisata di rupa utara kabupaten bengkalis (2022)	Menurut Emerson dkk. (2011), <i>collaborative governance</i> didefinisikan sebagai “struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan individu secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkatan pemerintahan, serta sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain” (Emerson dkk., 2011:2). Definisi ini mencakup kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap desa di Kecamatan Rupa Utara memiliki potensi pariwisata.
14.	Erica Indah Maulia, Budi Setiyono. <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata	Menurut Ansell dan Gash (2008), <i>collaborative governance</i> adalah pendekatan dalam manajemen kebijakan yang menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar berbagai aktor, termasuk	Metode Penelitian kualitatif.	Menurut temuan penelitian, lima tahapan proses kemitraan Desa Wisata Nglanggeran telah berhasil dilaksanakan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Pemerintah, masyarakat,

	nglanggeran: analisis dampak digitalisasi desa wisata (2023)	pemerintah, organisasi nonpemerintah (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan.		sektor komersial, dan lembaga terkait semuanya memainkan peran aktif dalam keberhasilannya. Namun, kemitraan ini masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk ketidakmampuan menyelaraskan tujuan para pemangku kepentingan yang terkadang kurang mendukung pelestarian lingkungan, distribusi manfaat yang tidak merata, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menghidupkan kembali kepemimpinan. Selain itu, digitalisasi muncul sebagai komponen penting dalam keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran, terutama dalam hal layanan dan promosi kepada pengunjung.
15.	Ida Ayu Dewi Indrayani, Ni Putu Anik Prabawatia, Putu Dharmanu Yudarth. <i>Collaborative Governance</i> Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar), (2024)	Dalam <i>Collaborative Governance</i> , terdapat sejumlah indikator yang dikemukakan oleh DeSeve sebagaimana dikutip dalam Sudarmo (2011) untuk mengukur keberhasilan suatu kolaborasi, yaitu: (1) Struktur Jaringan (<i>Networked Structure</i>), (2) Komitmen terhadap Tujuan Bersama (<i>Commitment to a Common Purpose</i>), (3) Kepercayaan antar Peserta (<i>Trust Among the Participants</i>), (4) Tata Kelola (<i>Governance</i>), (5) Akses terhadap Otoritas (<i>Access to Authority</i>), (6) Akuntabilitas/Tanggung Jawab Distribusi (<i>Distributive Accountability/Responsibility</i>), (7) Berbagi Informasi (<i>Information Sharing</i>), dan (8) Akses terhadap Sumber Daya (<i>Access to Resources</i>).	Metode Penelitian Kualitatif	Kolaborasi antara aktor pentahelix, pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis, dan media menurut temuan penelitian, berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti penggunaan sumber daya yang kurang optimal, kurangnya sumber daya manusia untuk memanfaatkan potensi pariwisata secara penuh, dan strategi pemasaran desa wisata yang kurang ideal.

16.	Yoseph Molla, Tjahya Supriatna, Layla Kurniawati. <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat, (2021)	<i>Collaborative Governance</i> adalah model tata kelola di mana satu atau beberapa lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik dan mengelola program publik (Ansell & Gash dalam Islamy, 2018:2). Dalam <i>Collaborative Governance</i> , Ansell dan Gash merujuk pada empat dimensi utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.	Metode Penelitian Kualitatif	Berdasarkan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang memfasilitasi, dan proses kolaboratif yang membentuk model kolaborasi desa, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Praiijing belum berjalan secara efisien. Banyak faktor internal dan eksternal, termasuk budaya, pengelolaan lembaga, anggaran, lokasi, masyarakat, sumber daya manusia, atraksi budaya, perencanaan, kebijakan pemerintah daerah, aksesibilitas, teknologi, daya saing objek wisata serupa, dan perubahan nilai budaya, menjadi penyebabnya. Faktor-faktor ini juga menjadi tantangan untuk masa depan.
17.	Fadlurrahman, Ari Mukti, Yuni Kurniasih, Rizza Arge Winanta. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur, (2022)	<i>Collaborative governance</i> adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, di mana setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kedudukannya masing-masing (Emerson et al., 2011:2; Ansell & Gash, 2007:544). Dalam jurnal ini, beberapa konsep utama <i>Collaborative Governance</i> yang dijadikan acuan meliputi: • <i>Networked Structure</i>: Keterlibatan berbagai stakeholder dalam jaringan tanpa struktur administratif yang kaku. • <i>Commitment to Common Purpose</i>: Komitmen bersama untuk mengembangkan pariwisata desa. • <i>Trust Among Participants</i>: Tingkat kepercayaan antar stakeholder dalam menjalankan perannya.	Metode Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur jaringan stakeholder di Desa Ngargogondo masih kurang terkoordinasi, melibatkan Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat setempat. Meski setiap pihak telah menjalankan perannya, jaringan ini belum memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk membangun desa wisata. Kekhawatiran muncul mengenai potensi tumpang tindih atau konflik terkait lahan dan kegiatan bisnis wisata di antara Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes, akibat pembagian tugas yang belum jelas, terutama jika nantinya struktur jaringan dibuat lebih terorganisir.

		• <i>Access to Authority</i>: Akses terhadap wewenang dalam pengambilan keputusan. • <i>Distributive Accountability</i>: Pembagian tanggung jawab di antara pihak terkait. • <i>Information Sharing</i>: Pertukaran informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. • <i>Access to Resources</i>: Ketersediaan sumber daya seperti dana, SDM, dan infrastruktur.		
18.	Hana Imtiyaza, Retno Sunu Astuti, Kismartini. <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata kaliwlingi di kabupaten brebes, (2024)	Menurut Ansell dan Gash, <i>collaborative governance</i> adalah proses pembentukan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan organisasi lintas sektor yang bertujuan menyelesaikan permasalahan kebijakan publik yang tidak dapat ditangani oleh satu organisasi saja. Ansell dan Gash juga menjelaskan bahwa model <i>collaborative governance</i> mencakup empat variabel utama, yaitu kondisi awal (<i>starting condition</i>), kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaboratif. Sementara itu, menurut Mattessich dan Monsey, terdapat enam faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi, yang diklasifikasikan ke dalam enam kelompok: (1) lingkungan, (2) keanggotaan, (3) proses/struktur, (4) komunikasi, (5) tujuan, dan (6) sumber daya.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama sudah diterapkan, namun belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat proses kolaborasi tersebut meliputi keanggotaan, struktur, komunikasi, dan ketersediaan sumber daya.
19.	Ajis Setiawan, Chamid Sutikno. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata	Menurut Ansell dan Gash (2008), <i>Collaborative Governance</i> merupakan suatu proses tata kelola yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses <i>Collaborative Governance</i> pada pengembangan desa wisata di Desa Winduaji, setiap pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, kelompok sadar

	Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, (2022)	non-pemerintah (LSM), dalam pengambilan keputusan secara kolektif melalui musyawarah dan konsensus. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan publik tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.		wisata, hingga sektor swasta memiliki peran masing-masing. Kolaborasi ini berhasil menciptakan kegiatan yang bermanfaat dan memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat setempat dan secara umum bagi lingkungan desa.
20.	Gian Anggraeni Andriyanto. <i>Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya</i> Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, (2024)	Menurut Ansell dan Gash, <i>collaborative governance</i> mencakup beberapa elemen kunci, yaitu: • <i>Starting Conditions</i>: Kondisi awal seperti sejarah kerja sama, ketidakseimbangan sumber daya, dan insentif untuk berpartisipasi. • <i>Facilitative Leadership</i>: Peran kepemimpinan dalam memfasilitasi dan mengarahkan proses kolaborasi. • <i>Institutional Design</i>: Struktur dan aturan kelembagaan yang mendukung kerja sama antar pihak. • <i>Collaborative Process</i>: Proses kolaborasi yang melibatkan pertemuan tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil sementara (<i>intermediate outcomes</i>).	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Sitiwinangun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator Ansell dan Gash yang belum terpenuhi, seperti belum adanya aturan resmi yang mengikat para stakeholder, ketidakseimbangan dan kurangnya transparansi sumber daya, rendahnya tingkat kepercayaan antar stakeholder, serta kepemimpinan yang belum efektif. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan strategi pemasaran gerabah, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait pengembangan wisata.
Jurnal Internasional				
21.	I Putu Mertha Astawa, I Made Wardana, I Putu Gde Sukaatmadja, and Tjok. Gde	Teori ini dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) dan menjelaskan bagaimana pemerintah dan aktor non-pemerintah bekerja bersama dalam pengambilan	Metode Penelitian Kuantitatif,	Temuan penelitian ini mengungkap bahwa tata kelola kolaboratif memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pariwisata berkelanjutan.

	Raka Sukawati. Pariwisata inklusif: Kekuatan pendorong <i>collaborative governance</i> dalam memajukan pariwisata desa yang berkelanjutan, (2024)	keputusan dan implementasi kebijakan publik. Komponen utama <i>Collaborative Governance</i> dalam jurnal ini meliputi: • Dialog dan Musyawarah: Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan. • Kepemimpinan yang Memfasilitasi: Pemimpin yang mampu mengarahkan dan memediasi kepentingan antaraktor. • Keseimbangan Kekuasaan: Setiap aktor memiliki peran dan kontribusi yang seimbang. • Kepercayaan dan Komitmen: Membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan untuk keberlanjutan kerja sama.		Khususnya, dampak ini diperkuat oleh efek moderasi pariwisata inklusif, yang menunjukkan bahwa pariwisata inklusif memainkan peran yang beragam dan kompleks dalam hubungan rumit antara tata kelola kolaboratif dan pariwisata berkelanjutan di desa wisata. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi tata kelola kolaboratif dan pariwisata inklusif merupakan resep ampuh untuk pariwisata desa berkelanjutan.
22.	Mohammad Nuh, Mukhammad Kholid Mawardi, Rita Parmawati, Yusri Abdillah. Model <i>collaborative governance</i> pada tahun 2017 pariwisata desa berkelanjutan perkembangan (studi kasus: kemiren desa wisata di geopark kawah ijen situs budaya), (2024)	Model <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell & Gash (2008) terdiri dari lima komponen utama, yaitu: (1) <i>Starting Conditions</i> , (2) <i>Facilitative Leadership</i> , (3) <i>Institutional Design</i> , (4) <i>Collaborative Process</i> , dan (5) <i>Outcomes</i> .	Metode Penelitian Kualitatif	1) <i>Starting Condition</i>: Kesadaran masyarakat terhadap konsep Geopark masih rendah, tetapi meningkat berkat meningkatnya kunjungan wisatawan. 2) <i>Facilitative Leadership</i>: Pemerintah desa telah berperan aktif dalam mengoordinasikan stakeholder, tetapi perlu lebih banyak keterlibatan dari pemimpin lokal untuk mendukung visi jangka panjang. 3) <i>Institutional Design</i>: Sudah ada regulasi desa terkait pelestarian budaya dan pengelolaan wisata, tetapi transparansi pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan. 4) <i>Collaborative Process</i>: Interaksi antar stakeholder cukup baik melalui dialog tatap muka

				dan sosialisasi, tetapi masih ada kendala dalam kejelasan arah kebijakan dari pemerintah daerah. 5) <i>Outcomes</i> : Pengembangan desa wisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi dampak negatif terhadap lingkungan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
23.	Andre Ariesmansyah, Rifqi Khaerul Arifin. Penilaian <i>Collaborative Governance</i> Pengembangan Desa Wisata di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. (2024)	<i>Collaborative Governance</i> menurut model Ansell & Gash (2007) menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam pengambilan keputusan secara kolaboratif. Unsur-unsur utama dalam model ini meliputi: (1) <i>Face-to-Face Dialogue</i> , (2) <i>Trust Building</i> , (3) <i>Commitment to the Process</i> , (4) <i>Shared Understanding</i> , dan (5) <i>Intermediate Outcomes</i> .	Metode Penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat, serta tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan desa wisata. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya modal, dan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pengembangan desa wisata.
24.	<i>Collaborative Governance</i> di Desa Wisata Pembangunan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Provinsi, Indonesia, Asep Nurwanda, Dahyar Daraba, Tjahjo Suprajogo, Diah Puspita, (2024)	Penelitian ini mengacu pada teori <i>Collaborative Governance</i> yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007), yang menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan secara bersama. Model <i>collaborative governance</i> yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat dimensi utama, yaitu: <i>initial conditions</i> (kondisi awal) untuk memetakan kekuatan dan pengaruh pemangku kepentingan, <i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif) yang	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan desa wisata saat ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola kolaboratif. Sebab, belum terbentuknya kepercayaan pada masing-masing aktor yang terlibat. Model pengembangan desa wisata yang ideal dan mengadopsi tata kelola kolaboratif adalah Model Pengembangan Pariwisata. Model ini mengutamakan membangun kepercayaan dan

		mengarahkan jalannya kolaborasi, <i>institutional design</i> (desain kelembagaan) yang menetapkan aturan kerja sama, dan <i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) yang meliputi dialog, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama.		komitmen berkelanjutan pada setiap pelaku pembangunan desa wisata.
25.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Karangsalam Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, Chamid Sutikno, Zaula Rizqi Atika, Shadu Satwika Wijaya, Andi Zaelani, (2022)	Penelitian ini mengadopsi teori <i>Collaborative Governance</i> yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai kerangka analisis dalam pengembangan Desa Wisata Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam pengelolaan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, <i>Collaborative Governance</i> mencakup empat aspek utama, yaitu: <i>initial conditions</i> (kondisi awal) yang mencerminkan kesiapan sumber daya dan pemangku kepentingan, <i>institutional design</i> (desain kelembagaan) yang mengatur tata kelola kerja sama, <i>facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif) yang berperan sebagai penghubung komunikasi dan koordinasi antar aktor, serta <i>collaborative process</i> (proses kolaboratif) yang meliputi interaksi tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan kesepahaman di antara para pemangku kepentingan.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> yang diterapkan meliputi analisis pengembangan desa wisata di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden. Keberadaan Desa Wisata di Karangsalam mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek, meningkatkan pendapatan warga setempat, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli desa.

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai jurnal (2025)

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu terlihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan kerangka *collaborative governance* dalam konteks pengembangan desa wisata maupun destinasi pariwisata lokal. Penelitian yang banyak dikaji adalah mengenai Goa Pindul, Desa Wisata Nglanggeran, Sitiwinangun, Winduaji, serta beberapa destinasi lain yang memperlihatkan bagaimana proses kolaborasi antar-aktor berlangsung dalam pengelolaan pariwisata. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi lintas pihak sudah terbentuk, namun masih menghadapi kendala. Beberapa studi juga menyoroti peran Pokdarwis yang cukup sentral, tetapi masih terkendala oleh rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa, sehingga pelaksanaan promosi maupun pengelolaan destinasi belum optimal. Penelitian yang memperlihatkan praktik kolaborasi yang relatif berhasil, seperti di Geopark Silokek atau Desa Wisata Nglanggeran, meskipun masih menyisakan masalah pemerataan manfaat dan kesinambungan program. Terdapat pula penelitian yang mengaitkan kolaborasi dengan inovasi, misalnya pemanfaatan digitalisasi destinasi dan pariwisata inklusif, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh dukungan teknologi dan keterlibatan aktor secara merata. Dengan demikian, posisi penelitian ini mengambil ruang pada konteks desa wisata rintisan seperti Kalongan yang menghadapi isu spesifik berupa lemahnya transparansi pengelolaan, keterbatasan kapasitas SDM, serta tantangan aksesibilitas akibat faktor geografis. Penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan dari penelitian terdahulu dengan menekankan bagaimana *collaborative governance* dapat dijalankan secara akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan dalam kondisi yang serba terbatas.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Administrasi Publik

Istilah administrasi mencakup beragam unsur, seperti pengarah, tata kelola, pelaksanaan program, pengendalian, serta pengembangan prinsip-prinsip untuk melaksanakan kebijakan publik. Administrasi juga mencakup proses analisis, penyeimbangan, dan penyusunan keputusan serta pertimbangan dalam kebijakan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kolektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik, serta berperan sebagai wadah bagi kajian akademik dan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh A. Dunsire yang dikutip oleh (Donovon dan Jackson, 1991:9) dalam (Keban, 2019). Sementara itu, Trecker (dalam Donovan & Jackson, 1991) menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan terus berlangsung, yang bertujuan untuk mencapai sasaran melalui pemanfaatan manusia dan sumber daya secara kolektif melalui kerja sama. Donovan dan Jackson juga menegaskan bahwa aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan secara jelas termasuk dalam definisi administrasi tersebut.

Dalam Yuningsih (2025), Siagian menyatakan bahwa administrasi adalah usaha kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih, menggunakan gagasan rasional tertentu, dan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kata publik sendiri memiliki definisi yang diungkapkan oleh Jefkins dalam Yuningsih (2025) bahwa publik adalah orang-orang yang melakukan kegiatan saling berinteraksi atau berkomunikasi didalam sebuah organisasi tertentu secara internal maupun eksternal. Secara keseluruhan makna administrasi publik memiliki pengertian yang cukup luas.

Menurut McDrury dalam Yuningsih (2025) pada studi literatur yang dilakukannya, McDurry berpendapat bahwa Administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang dapat dikaji menggunakan pendekatan politik, artinya sebagai salah satu dari metode yang didalamnya terdapat kegiatan melakukan sebuah perintah pada suatu wilayah yang dispesifikasikan sebagai negara, selain itu dapat diartikan sebagai cara prinsipil yang dilakukan untuk menjalankan fungsi – fungsi sebuah negara.

Pasolong (2014) mendefinisikan administrasi sebagai jenis kolaborasi di mana sebuah tim bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Syafiie (2010) menjelaskan bahwa istilah "publik" menggambarkan sekumpulan orang yang serupa dalam harapan, sikap, perilaku, dan cara berpikir mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar dan nilai-nilai yang mereka pegang. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Syafiie, 2010), administrasi publik adalah jenis kerja sama antar kelompok dalam pemerintahan yang mencakup cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik sebagai bagian dari dinamika politik. Selain itu, administrasi publik juga memiliki hubungan yang erat dengan sektor swasta maupun individu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (Syafiie, 2010).

Dari berbagai definisi yang telah dijabarkan, administrasi publik dapat dipahami sebagai konsep yang menekankan kerja sama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks pemerintahan.. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perumusan

kebijakan publik, pelaksanaan program-program pemerintah, hingga penyediaan layanan bagi masyarakat. Kerja sama antara lembaga pemerintah termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting bagi administrasi publik. Setiap cabang pemerintahan memiliki fungsi tersendiri dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, administrasi publik dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif demi mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. Dalam praktiknya, administrasi publik juga melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan individu, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara menyeluruh dan terpadu.

1.7.2 Paradigma Administrasi Publik

Adanya perubahan dan perkembangan disiplin ilmu dapat diamati melalui pergeseran paradigma. Menurut Kuhn dalam Yuniningsih (2025), paradigma adalah pandangan tertentu yang mencakup nilai-nilai, metode, gagasan pokok, dan pendekatan dalam pemecahan masalah yang telah diterima oleh suatu kelompok atau komunitas ilmiah sepanjang waktu. Pandangan ini dapat berubah sebagai respons terhadap krisis atau keanehan yang menantang pandangan dominan kelompok tersebut dan mendorong mereka untuk mencari kerangka yang lebih cocok yaitu, paradigma baru..

Administrasi publik tidak bisa terlepas dari pengaruh perubahan lingkungan, termasuk perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan reformasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kini

diharapkan oleh masyarakat administrasi publik harus mampu menyesuaikan diri dengan paradigma yang dominan. Nicholas Henry adalah individu yang terkenal karena pandangannya tentang paradigma administrasi publik. Henry mengemukakan lima paradigma administrasi publik pada awal tahun 1970-an. Namun pada 2018, ia mengubah pendapatnya dan memperkenalkan paradigma baru, sehingga menjadi enam paradigma secara keseluruhan (Muluk, 2020).:

1. Paradigma Pemisahan Politik dan Administrasi (1900–1926): Menurut paradigma ini, ranah politik adalah tempat pembuatan kebijakan berlangsung dan berfokus pada tujuan rakyat. Politik dan administrasi jelas berbeda satu sama lain; cabang legislatif mewakili kehendak rakyat, sementara cabang eksekutif melaksanakan keputusan yang telah dibuat.
2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937): Administrasi publik pada masa ini berfokus pada penerapan konsep administrasi dasar, termasuk mengorganisir, merencanakan, mengelola sumber daya manusia, mengarahkan, mengoordinasikan, melaporkan, dan membuat anggaran.
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950–1970): Administrasi publik saat ini dianggap sebagai subbidang ilmu politik. Gagasan bahwa sebagian besar konsep ilmu politik termasuk dalam bidang administrasi publik muncul karenanya. Namun, karena keterkaitannya yang terlalu erat dengan ilmu politik, paradigma ini dianggap telah kehilangan identitasnya.
4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970): Pada titik ini, pendekatan ilmiah terhadap studi dan penerapan gagasan

manajemen yang sudah mapan mulai diterapkan. Paradigma ini berkembang dalam dua cara utama: pertama, melalui administrasi negara yang memanfaatkan berbagai bidang, termasuk psikologi sosial; dan kedua, melalui administrasi yang memprioritaskan kebijakan publik.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-an): Dengan penekanan pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, paradigma ini menyoroti batas-batas teori administrasi negara. Pada masa ini, manajemen negara terutama berkaitan dengan menemukan solusi untuk masalah publik.
6. Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990–sekarang): Untuk mencapai tata kelola yang baik, paradigma ini menekankan peran yang dimainkan oleh administrasi publik dalam menciptakan *good governance*. Masyarakat kini menjadi pemangku kepentingan utama dan kekuasaan tidak lagi terbatas pada pemerintah saja. Tiga komponen utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor korporasi, harus bekerja sama dengan harmoni dan keseimbangan untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Berdasarkan paradigma di atas, paradigma yang sesuai dengan penulisan ini yaitu paradigma yang dikemukakan oleh Cheema dalam Keban (2014: 37-38) pada point ke 6 yaitu paradigma *governance* yang didalamnya berisi kepentingan publik yang melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan Pengembangan Pariwisata Melalui *Collaborative*

Governance di Desa Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang Terintegrasi.

1.7.3 Manajemen Publik

Dalam manajemen publik, terdapat konsep dasar yang berasal dari pengertian manajemen itu sendiri. Shafritz dan Russell dalam Keban (2014:92) menyatakan bahwa manajemen berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab mengoperasikan sebuah perusahaan dan melibatkan proses mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Overman dalam Keban (2014:92), manajemen publik adalah disiplin studi interdisipliner yang secara menyeluruh memeriksa berbagai aspek suatu organisasi. Gagasan ini menggabungkan empat fungsi manajemen utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penggunaan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya politik, keuangan, fisik, dan manusia.

Perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian termasuk dalam tindakan-tindakan yang membentuk manajemen, menurut Griffin dalam Qomariyah (2024:187). Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi, semua tindakan ini difokuskan pada pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi, seperti sumber daya finansial, manusia, fisik, dan informasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Overman yang dikutip dalam Yuniningsih (2025), yang menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan bidang interdisipliner yang mencakup berbagai aspek organisasi secara umum serta menggabungkan fungsi dari utama manajemen, yaitu POAC

(*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Setiap fungsi tersebut berkaitan dengan pemanfaatan elemen-elemen penting seperti sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan aspek politik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif.

Menurut Wilson dalam Yuniningsih (2025), terdapat empat kajian utama administrasi publik yang hingga kini menjadi bagian penting dalam manajemen publik, yaitu:

1. Pemerintahan berperan sebagai lingkungan utama tempat organisasi beroperasi.
2. Fungsi eksekutif menjadi elemen sentral dalam pelaksanaan administrasi publik.
3. Upaya untuk menemukan prinsip juga teknik manajemen dimana yang lebih efektif dipandang sebagai suatu kunci dalam meningkatkan kompetensi administrasi.
4. Pendekatan komparatif digunakan sebagai metode dalam mempelajari dan mengembangkan bidang administrasi publik..

Konsep manajemen publik pada dasarnya berfokus pada aspek implementatif, yakni pada penerapan berbagai model, teori, metode, teknik, dan pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi secara efisien juga efektif (Firdausijah et al. dalam Qomariyah, 2024:190). Sementara itu, Donovan dan Jackson dalam Qomariyah (2024:190) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan serangkaian aktivitas yang menuntut keterampilan

dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan berbagai kepentingan, serta memastikan tercapainya hasil sesuai dengan sasaran kebijakan publik.

Menurut Shafritz dan Russel dalam Qomariyah (2024:190), manajemen publik dipahami sebagai bentuk tanggung jawab seseorang dalam mengelola organisasi serta memanfaatkan dari sumber daya yang ada, baik manusia maupun nonmanusia secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Sementara itu, Nor Ghofur (2014) dalam Qomariyah (2024:190) memandang manajemen publik sebagai bentuk manajemen pemerintahan yang berfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wilson dalam Yuniningsih (2025) menyatakan bahwa terdapat empat fokus utama studi administrasi publik yang masih relevan dalam manajemen publik hingga saat ini, yaitu:

1. Pemerintah berperan sebagai lingkungan utama dalam suatu organisasi,
2. Fungsi eksekutif menjadi aspek sentral dalam penyelenggaraan administrasi,
3. Upaya menemukan prinsip dan teknik manajemen yang lebih efisien menjadi dasar pengembangan kompetensi administrasi, serta
4. Penggunaan metode komparatif sebagai pendekatan dalam penelitian dan pengembangan administrasi publik.

Manajemen publik menggabungkan elemen dari banyak bidang akademik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu manajemen publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kontribusi dari ilmu manajemen, administrasi

publik, kebijakan publik, ilmu politik, serta disiplin ilmu lainnya. Integrasi dari berbagai bidang tersebut menjadi landasan munculnya dan berkembangnya studi mengenai manajemen publik (Qomariyah, 2024:190).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Overman yang dikutip oleh Keban dalam Qomariyah (2024:190), yang menegaskan bahwa manajemen publik tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan “*scientific management*,” meskipun memiliki pengaruh kuat dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Selain itu, manajemen publik bukan hanya "analisis kebijakan" atau bagian dari administrasi publik; melainkan, manajemen publik berada pada persimpangan pendekatan instrumental-rasional dan pendekatan kebijakan-politik. Oleh karena itu, manajemen publik dipandang sebagai bidang studi multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik dengan aspek umum organisasi dan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

Paradigma Manajemen Publik telah mengalami perubahan seiring dengan dinamika perkembangan zaman, dimulai dari paradigma *Old Public Administration* (OPA), kemudian bergeser ke *New Public Management* (NPM), berlanjut pada konsep government, hingga akhirnya berkembang menjadi paradigma *governance*. Pergeseran ini melahirkan pendekatan baru yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental*

Organization atau NGO) dalam proses pengambilan keputusan serta penyelesaian persoalan publik (Tilano & Suwitri dalam Yuniningsih, 2025).

Dalam kaitannya dengan konsep *governance* sebagai jaringan (*networks*) yang berhubungan dengan kemitraan, Loffler dan Bovaird dalam Yuniningsih (2025) mengemukakan beberapa makna dari *governance*. Pertama, *governance* dipahami sebagai cara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berinteraksi dan saling memengaruhi dalam menentukan hasil kebijakan. Kedua, sebagai pola atau struktur yang terbentuk dalam sistem sosial-politik yang merupakan hasil dari interaksi dan intervensi berbagai aktor. Ketiga, *governance* mencakup bentuk koordinasi baik formal maupun informal antara sektor publik dan swasta. Keempat, konsep ini juga menggambarkan teori tentang bagaimana suatu sistem sosial dikelola dan dikoordinasikan dengan menempatkan negara sebagai salah satu aktor di dalamnya. Loffler dan Bovaird dalam Yuniningsih (2025) juga menyatakan bahwa aspek paling krusial dalam *governance* terletak pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika masalah kolektif tidak dapat diselesaikan hanya oleh otoritas publik. Dalam situasi tersebut, diperlukan kolaborasi dengan aktor-aktor lain seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bentuk kerja sama ini dilakukan melalui mekanisme mediasi, *arbitrasi*, serta *self-regulation* yang dinilai lebih efektif dibandingkan dengan tindakan langsung dari pemerintah.

Teori Manajemen Publik telah mengalami perkembangan. Dalam konteks *New Public Management* (NPM), manajemen publik lebih menekankan pada perlunya memberikan dasar motivasi dan argumen yang logis dalam setiap

keputusan yang diambil. Selain itu, NPM juga menyoroti kontribusi manajemen publik dalam membangun kesepahaman dan berbagai gagasan terkait kepentingan publik. Pendekatannya bukan hanya tentang menemukan solusi cepat dari pilihan individu, tetapi juga menciptakan pembagian tanggung jawab dan kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ini, Fadel Muhammad Resource Center (2014) dan para ahli lainnya menekankan pentingnya manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat (Yuniningsih, 2025).

Berdasarkan berbagai sudut pandang yang telah diungkapkan, dapat dikatakan bahwa manajemen publik adalah kumpulan kegiatan atau ketidakaktifan pemerintah yang berfokus pada manajemen internal perusahaan sektor publik. Dalam upaya menangani kepentingan publik dan mewujudkan kepentingan bersama, manajemen publik berfungsi untuk menjamin bahwa semua tindakan dalam organisasi publik dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Atau lebih ringkasnya manajemen publik adalah proses yang didalamnya terdapat usaha pencapaian suatu tujuan menggunakan sumber daya organisasi dan dalam lingkup pemerintahan sebagai setting utama.

1.7.4 Collaborative Governance

Jung et al. (2009:1) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan, pengarahan, fasilitasi, operasionalisasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan organisasi lintas sektor. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu kebijakan publik yang kompleks dan juga tidak dapat diatasi hanya satu organisasi saja.

Proses kolaborasi tersebut disebut *collaborative governance*, juga dipahami sebagai suatu proses dan struktur dalam penyusunan kebijakan publik serta pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak di luar batas-batas lembaga publik. Kolaborasi ini mencakup keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama, dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative Governance* merupakan salah satu bentuk tata kelola di mana seluruh aktor, baik dari sektor publik maupun swasta, bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya melalui suatu proses bersama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pemerintah dan sektor bisnis tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling berkolaborasi dalam mewujudkan kepentingan bersama serta meningkatkan kesejahteraan publik.

Berdasarkan pandangan sejumlah ahli yang relevan dengan penelitian ini, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai suatu mekanisme kerja sama yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat dalam menangani permasalahan publik guna mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Berbagai konsep dan definisi tersebut menjadi rujukan penting bagi banyak akademisi dalam mengkaji *collaborative governance*. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) kemudian mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mendefinisikannya sebagai suatu proses dan struktur dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan kebijakan publik yang

melibatkan partisipasi konstruktif dari masyarakat, lembaga-lembaga publik, berbagai tingkat pemerintahan, serta sektor privat dan sipil, guna mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diwujudkan tanpa kolaborasi lintas sektor.

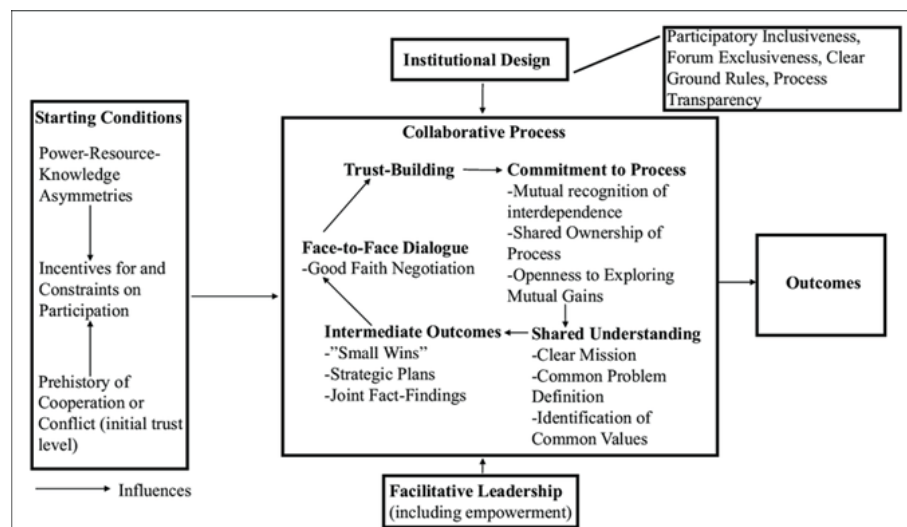
Blomgren Bingham (2010) menjelaskan bahwa istilah *collaborative* berarti bekerja bersama (*co-labor*) untuk mencapai tujuan yang sama melalui interaksi lintas batas dalam hubungan yang melibatkan berbagai sektor dan aktor. Ia menekankan bahwa kolaborasi mencakup keterlibatan sejumlah pihak yang saling berkontribusi dan saling mendukung dalam mencapai sasaran tertentu, tidak terbatas pada satu sektor saja. Dengan demikian, *governance* dipahami sebagai sistem pemerintahan yang mengintegrasikan kerja sama antara aktor negara (*state*) dan non-negara (*non-state*) di berbagai sektor guna mewujudkan tujuan bersama melalui pendekatan kolaboratif.

1.7.5 Model dan Proses *Collaborative Governance*

1. Kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008)

Ansell dan Gash (2008:550) mengemukakan bahwa kolaborasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni kolaborasi normatif dan kolaborasi sebagai proses. Kolaborasi normatif merupakan pendapat dengan tujuan dalam mencapai interaksi dengan mitra, kolaborasi proses merupakan rangkaian proses yang mengatur seluruh pihak meliputi pemerintah dan stakeholder terkait agar kolaborasi ini merujuk pada organisasi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan kepentingannya. Menurut Ansell dan Gash (2008), teori *collaborative governance* merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan

(*institutional design*), kepemimpinan (*leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*), yang secara keseluruhan menggambarkan dinamika interaksi antaraktor dalam penyelenggaraan tata kelola kolaboratif sebagaimana dijelaskan berikut ini.



Gambar 1. 9 Model *Collaborative Governance* Menurut Ansell dan Gash

Sumber: Ansell dan Gash, 2008

Berdasarkan model tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi awal organisasi memiliki pengaruh penting terhadap proses kolaborasi yang dijalankan. Tahapan ini mencakup beberapa variabel utama, seperti adanya kesenjangan dalam pengetahuan, sumber daya, dan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan, serta latar belakang interaksi sebelumnya yang menjadi dasar kepercayaan para pihak. Selanjutnya, tahap desain kelembagaan berfokus pada pembentukan aturan main, norma, serta legitimasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi agar proses kerja sama dapat berjalan secara adil, transparan, dan terarah. Tahap ketiga, yaitu kepemimpinan, memegang peran krusial dalam merumuskan serta mengimplementasikan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi.

Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk menjaga arah kerja sama dan memastikan keterlibatan seluruh pihak berjalan seimbang. Selanjutnya, tahap proses kolaboratif mencakup beberapa elemen penting seperti dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan pencapaian hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Tahapan-tahapan ini sangat penting dalam pengelolaan urusan publik karena berfungsi sebagai strategi untuk mencapai tujuan bersama di antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Dengan demikian, Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008) terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu:

- 1) Kondisi Awal (*Starting Condition*) Pada tahap kondisi awal, setiap stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi membawa latar belakang, kepentingan, serta sumber daya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menimbulkan hubungan yang tidak seimbang (*asimetris*) di antara para aktor, baik dari segi kekuasaan, kapasitas, maupun tingkat pengetahuan. Oleh karena itu, memahami kondisi awal menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi hambatan serta menentukan strategi agar kolaborasi dapat berjalan secara adil dan efektif bagi seluruh pihak yang terlibat.
- 2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*), menurut Ryan dalam Ansell dan Gash, kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam

menjaga agar proses kolaborasi berjalan efektif dan seimbang.

Kepemimpinan ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a. Kemampuan dalam mengelola proses kolaborasi secara memadai agar komunikasi dan koordinasi antar-aktor dapat berlangsung dengan baik.
 - b. Kredibilitas teknis, yaitu kemampuan pemimpin untuk menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang dapat dipercaya sehingga mampu memandu arah kolaborasi secara profesional.
 - c. Pemberdayaan kolaborasi, yakni memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki kesempatan dan kewenangan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara sah dan dapat diterima oleh semua aktor..
- 3) Desain institusional (*Institutional Design*) Ansell dan Gash mendefinisikan desain kelembagaan sebagai hukum dasar dan prosedur utama yang berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan proses kolaboratif. Pada titik ini, legitimasi procedural, yang mencakup memastikan bahwa semua metode kolaborasi dijalankan secara adil, terbuka, dan dapat diterima oleh semua pihak—merupakan faktor yang paling krusial. Untuk memastikan bahwa semua aktor, baik dari sektor publik, komersial, maupun komunitas, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi dalam proses kolaboratif, pemerintah harus bersikap transparan dan inklusif dalam hal ini.
- 4) Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*) Model proses kolaborasi menjelaskan bahwa kolaborasi berkembang melalui beberapa tahapan yang

berkesinambungan. Gray, sebagaimana dikutip oleh Ansell dan Gash, mengidentifikasi tiga tahapan utama dalam proses kolaborasi, yaitu *problem setting* (penentuan masalah), *direction setting* (penentuan arah dan tujuan bersama), serta *implementation* (pelaksanaan kesepakatan).

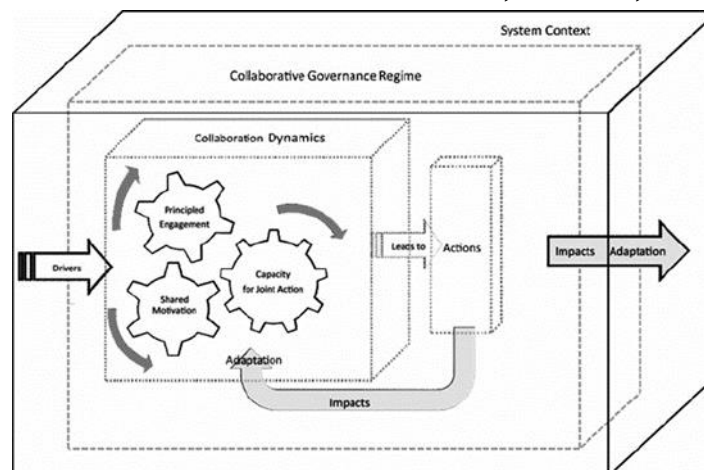
Beberapa komponen penting terlibat dalam proses kolaborasi dalam *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu:

- a. Dialog Tatap Muka, menjadi proses inti dalam upaya membangun pemahaman, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam proses kolaborasi. Hal ini disebabkan dialog tatap muka merujuk pada komunikasi langsung antara pemangku kepentingan dalam ruang kolaboratif, yang menjadi dasar untuk membangun kepercayaan yang baik. Menurut Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka memiliki peran krusial bagi para pemangku kepentingan karena memungkinkan mereka menemukan peluang yang saling menguntungkan serta memperdalam pemahaman bersama terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi.
- b. Membangun kepercayaan, meliputi upaya menumbuhkan rasa saling memahami, menghormati, dan meyakini antar pemangku kepentingan melalui dialog yang terbuka. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa proses ini bersifat dinamis serta membutuhkan perhatian, komitmen, dan keterlibatan berkelanjutan dari seluruh pihak yang berpartisipasi.

- c. **Komitmen Terhadap Proses**, mengacu pada pembentukan keyakinan dan penguatan rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan, sehingga muncul hubungan saling ketergantungan yang mendorong partisipasi aktif dalam kolaborasi. Aspek ini mencakup keterbukaan untuk berkembang bersama, kesadaran akan ketergantungan antaraktor, serta rasa memiliki terhadap proses yang dijalankan secara kolektif.
- d. **Pemahaman Bersama**, merupakan proses pembentukan persepsi yang selaras di antara para pemangku kepentingan terhadap tujuan yang telah disepakati. Tahapan ini melibatkan penyamaan nilai-nilai kolaborasi, penegasan tujuan bersama, serta pengenalan terhadap permasalahan yang dihadapi. Proses ini membutuhkan komitmen, perhatian, dan keterlibatan berkelanjutan dari seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
- e. **Hasil Sementara**, adalah pencapaian pertama atau keluaran kecil yang muncul sepanjang proses kolaborasi dan yang dapat dialami secara fisik oleh pihak-pihak yang terlibat. Hasil-hasil ini dapat muncul sebagai tujuan strategis, data bersama, atau kesuksesan lain yang dapat diamati. Keberadaan hasil sementara berperan penting dalam memperkuat kepercayaan, meningkatkan partisipasi, serta menumbuhkan komitmen antar pemangku kepentingan, sekaligus menjadi indikator kemajuan menuju tujuan kolaboratif yang lebih besar.

2. Kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) Emerson

Nabatchi, & Balogh (2012) menjelaskan terkait kerangka kerja integrative dari sistem *collaborative governance* yang dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi sistem *context*, *collaborative governance regime*, dan *collaboration dynamics*. Dalam teori Emerson, proses kolaborasi dijelaskan melalui konsep *Collaborative Governance Regime* (CGR), yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu dinamika kolaboratif (*collaborative dynamics*), tindakan kolaboratif (*collaborative actions*), dan hasil atau dampak sementara (*temporary outcomes*). Ketiga elemen ini saling berhubungan dan membentuk satu sistem tata kelola kolaboratif yang berkesinambungan. Berikut pada Gambar 1.10 ditampilkan model sistem *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh.



Gambar 1. 10 Model Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, & Balogh

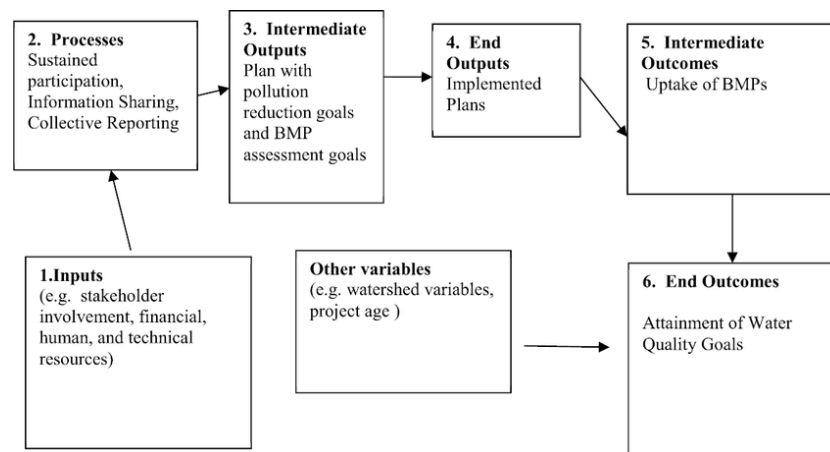
Sumber: Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012

Berkaitan dengan *collaborative governance regime* yang memiliki 3 bagian dalam pelaksanaan. Pada tahapan awal yaitu dinamika kolaborasi ini memiliki

beberapa variabel yaitu keterikatan prinsip merupakan penegasan tujuan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh aktor yang terlibat, motivasi bersama merupakan penguatan kepercayaan dan pemahaman terkait tujuan yang akan dicapai, dan kapasitas bersama merupakan penegasan tujuan terhadap hasil yang diinginkan dengan upaya peningkatan kapasitas secara bersama-sama.

3. Kolaborasi menurut Biddel dan Koontz (2014)

Biddel dan Koontz (2014) menggambarkan tata kelola dari kolaboratif dengan memisahkan indikator keluaran yang terbagi atas enam komponen yang meliputi komponen *inputs*, *processes*, *intermediate output* dan *end outputs*, serta *intermediate outcome* dan *end outcome*. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan sistem dari *collaborative governance* menurut Biddel dan Koontz



Gambar 1. 11 Model *Collaborative Governance* Biddel dan Koontz (2014)

Sumber: Biddel dan Koontz, 2014

Komponen input pada penelitian Biddel dan Koontz (2014) misalnya keterlibatan dari pemangku kepentingan, keuangan, sosial, dan sumber daya teknis. Komponen proses menjelaskan unsur yang terkait yaitu partisipasi

berkelanjutan, berbagi informasi, dan pelaporan kolektif. Komponen *intermediate output* end *output* pada bagian *intermediate* ini menjelaskan tentang perencanaan yang telah dibuat dan diselesaikan oleh organisasi, sedangkan *end output* ini mengarah pada penerapan dari perencanaan yang telah dibuat. Komponen *intermediate outcome* ini menjelaskan tentang perencanaan dari komponen proses yang mana nantinya akan diawasi dan dievaluasi serta pada end outcome ini menghasilkan variabel lain seperti perubahan pola dari penggunaan sumber daya ataupun perubahan dari lingkungan.

Model proses oleh Ansell & Gash (2008) lebih cocok untuk penelitian tentang proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Alasan utamanya adalah karena penelitian ini berfokus pada tahapan dan dinamika kerjasama yang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata desa antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Model yang disampaikan oleh Ansell dan Gash menunjukkan dasar-dasar proses kolaboratif, yang mencakup komunikasi tatap muka antara peserta, pengembangan kepercayaan, komitmen terhadap keberlanjutan proses, pembentukan saling pengertian, dan pencapaian hasil yang mendorong pertumbuhan pariwisata berbasis komunitas. Jenis kerja sama ini melibatkan sejumlah peserta di lingkungan Desa Wisata Kalongan, seperti pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), BUMDes, masyarakat setempat, dan pihak swasta. Keberhasilan pengembangan wisata bergantung pada bagaimana masing-masing aktor dapat membangun pemahaman bersama, berbagi sumber daya, dan menciptakan legitimasi dalam tata kelola wisata. Dengan

demikian, model Ansell & Gash (2008) memberikan pendekatan yang lebih sesuai dalam memahami bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Kalongan dapat terbentuk dan berjalan secara efektif.

1.7.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance*

Menurut *Government of Canada Collaborative Governance* (2008) menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat proses *collaborative governance* yang disebabkan oleh faktor berikut:

1. Faktor Budaya

Budaya memegang peran penting dalam pelaksanaan *collaborative governance*, yakni suatu strategi penyelesaian masalah yang memprioritaskan kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah bersama serta membuat keputusan secara kolektif. Namun demikian, budaya yang terlalu bergantung pada prosedur birokrasi dan enggan menghadapi ketidakpastian dapat menjadi penghambat dalam keberhasilan kolaborasi. Sikap yang cenderung konservatif dan takut untuk mencoba hal baru bisa merintangi terciptanya kolaborasi yang dinamis dan produktif.

Jika aparatur negara dan para pemimpin terlalu terpaku pada aturan formal dan tidak nyaman mengambil risiko, maka hal ini bisa membatasi kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan perubahan serta mengimplementasikan inovasi yang dibutuhkan dalam proses kolaborasi. Oleh karena itu, agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik, penting bagi para pelayan publik dan pemimpin untuk memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menjalin kemitraan dengan pendekatan yang fleksibel dan berfokus pada pencapaian hasil. Dalam konteks ini, penerapan

pendekatan *top-down* oleh pemerintah justru berpotensi menimbulkan berbagai kendala yang mengurangi efektivitas dan kesuksesan kolaborasi.

2. Faktor Institusi

Kolaborasi sering kali muncul sebagai respons terhadap kecenderungan institusi, terutama di kalangan aktor pemerintah, yang masih mempertahankan struktur organisasi dengan pola kerja hierarkis. Padahal, karakteristik kolaborasi cenderung bersifat spontan dan tidak terlalu bergantung pada aturan formal yang ketat ataupun mengikuti prosedur tradisional yang biasa dijalankan dalam keseharian, seperti *standar operasional prosedur* (SOP). Kemitraan antar pemangku kepentingan, baik dari organisasi pemerintah maupun dari sektor lainnya, dapat terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif mengenai kebutuhan bersama atau tujuan yang saling menguntungkan, meskipun struktur hierarkis dalam organisasi masing-masing tetap dipertahankan.

Dalam kolaborasi antara sektor pemerintah dan non-pemerintah, sangat penting untuk menciptakan ruang dialog terbuka serta mendorong pertukaran keahlian antar pihak yang terlibat. Pendekatan kolaboratif yang lebih horizontal memungkinkan seluruh pihak berperan aktif, berbagi pengetahuan, dan menyatukan sumber daya guna mencapai tujuan bersama. Proses ini biasanya melibatkan pembangunan jaringan kerja, penguatan kemitraan, serta pertukaran informasi yang transparan. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas yang baik antar pihak menjadi elemen penting bagi keberhasilan kolaborasi. Untuk itu, institusi publik perlu menyesuaikan praktik-praktik akuntabilitas mereka agar sejalan dengan dinamika kolaborasi lintas sektor yang lebih kompleks dan terbuka.

3. Faktor Politik

Aspek politik memainkan peranan penting dalam pelaksanaan *collaborative governance*, yakni pendekatan dalam menangani permasalahan publik melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Gagalnya upaya kolaborasi sering kali disebabkan oleh minimnya inovasi dari para pemimpin dalam menghadapi kompleksitas tujuan-tujuan politik yang berpotensi menimbulkan konflik. Melalui pendekatan kolaboratif, perbedaan kepentingan antar kelompok yang biasanya memicu konflik dapat diminimalisasi.

Namun, kolaborasi tetap memiliki kerentanan terhadap dinamika perubahan kepentingan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang bisa berdampak negatif terhadap kelangsungan kolaborasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang inovatif, komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi secara fleksibel agar kolaborasi dapat terus berjalan dan menghindari kegagalan.

1.7.6 Pariwisata

Istilah "pariwisata" dan "*tourist*" memiliki etimologi yang mirip. Yoeti (1996) mendefinisikan pariwisata sebagai setiap kegiatan yang melibatkan seseorang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain. Menurut E. Guyer Freuler dalam Oka A. Yoeti (1996), pariwisata adalah kegiatan yang didorong oleh keinginan manusia, termasuk kebutuhan akan perawatan kesehatan, perubahan pemandangan, serta kebutuhan untuk belajar dan mengalami hal-hal baru melalui pertemuan dengan orang-orang dari berbagai kelas sosial ekonomi atau kelompok etnis.

Menurut Suwanto, pariwisata adalah tindakan satu orang atau lebih melakukan perjalanan singkat ke suatu tujuan selain tempat tinggal mereka yang biasa untuk alasan yang tidak terkait dengan mencari uang (Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, 2017:21). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan yang didukung oleh berbagai layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah.

Pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun bangsa. Interaksi antara pengunjung, komunitas lokal, pengunjung lainnya, pemerintah, otoritas lokal, dan pelaku usaha semuanya merupakan bagian dari sifat pariwisata yang multifaset dan multidisiplin. Karena daya tarik objek wisatanya, pariwisata telah berkembang menjadi komponen penting yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu negara dan bahkan telah berkontribusi pada pengakuan luasnya. Oleh karena itu, suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan seseorang untuk alasan tertentu dari tempat asalnya ke lokasi di luar daerah tempat tinggalnya dapat dikategorikan sebagai pariwisata, seperti rekreasi, pendidikan, kesehatan, atau alasan lainnya, bukan untuk pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Menurut Suwena dan Widyatmaja (2017), terdapat beberapa ciri utama yang menjadi kriteria dalam suatu perjalanan pariwisata, yaitu:

- a. Perjalanan dilakukan hanya untuk jangka waktu sementara, tidak bersifat menetap.
- b. Perjalanan melibatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- c. Kegiatan perjalanan tersebut, dalam bentuk apa pun, selalu berhubungan dengan kegiatan rekreasi atau pertamasyaan.
- d. Individu yang bepergian sebagai pengunjung saat berada di lokasi wisata, bukan dengan tujuan untuk mencari nafkah di sana.

Suwena dan Widyatmaja (2017) juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam jenis pariwisata antara lain:

1. Berdasarkan letak geografisnya, pariwisata dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:
 - a. Pariwisata lokal (*local tourism*), yaitu kegiatan pada wisata yang memiliki cakupan wilayah terbatas pada area area tertentu, dalam hal ini misalnya pariwisata di Kota Denpasar atau Bandung.
 - b. Pariwisata regional (*regional tourism*), yakni kegiatan wisata yang berkembang dalam satu kawasan tertentu, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti wisata di Bali atau Yogyakarta..
 - c. Pariwisata nasional (*national tourism*) merupakan pariwisata berlangsung di suatu wilayah negara tersebut, di mana terdapat pesertanya bisa merupakan warga negara tersebut maupun warga asing yang tinggal di sana. Contohnya pariwisata di berbagai daerah Indonesia..

- d. Pariwisata regional-internasional, yaitu bentuk pariwisata yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan tertentu tersebut, seperti kawasan ASEAN.
 - e. Pariwisata internasional (*International tourism*) merupakan pariwisata yang mencakup banyak negara di dunia.
2. Pariwisata diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan bagaimana hal itu memengaruhi neraca pembayaran:
- a. Pariwisata aktif (*in bound tourism*), yang merupakan jenis pariwisata di mana pengunjung internasional datang ke suatu negara. Kegiatan ini meningkatkan neraca pembayaran negara yang dikunjungi dan menghasilkan pendapatan devisa.
 - b. Pariwisata pasif (*outgoing tourism*), yang merupakan jenis pariwisata yang dilakukan warga saat mereka bepergian ke luar negeri. Dari sisi ekonomi, hal ini dapat mengurangi devisa negara karena pengeluaran dilakukan di luar negeri.
3. Berdasarkan objek atau motivasi wisatanya, pariwisata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:
- a. Pariwisata budaya (*cultural tourism*), yang didorong oleh ketertarikan pengunjung terhadap seni dan budaya pada suatu daerah tertentu.
 - b. Pariwisata kesehatan (*recuperational tourism*), di mana wisatawan bepergian untuk tujuan penyembuhan atau relaksasi, misalnya seperti mandi pada sumber mata air panas atau lumpur.

- c. Pariwisata perdagangan (*commercial tourism*), yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perdagangan dalam skala nasional (dalam negara) maupun di luar internasional.
- d. Pariwisata olahraga (*sport tourism*), Ini adalah perjalanan santai yang dilakukan untuk menghadiri atau ikut serta dalam suatu acara olahraga di lokasi tertentu.
- e. Pariwisata politik (*political tourism*), secara khusus perjalanan untuk mengamati peristiwa atau kegiatan politik tertentu, seperti perayaan pada Hari Kemerdekaan.
- f. Pariwisata sosial (*social tourism*), yang diselenggarakan tanpa tujuan mencari keuntungan, seperti kegiatan studi wisata atau rekreasi sekolah.
- g. Pariwisata religi (*religion tourism*), khususnya liburan yang dimaksudkan untuk menyaksikan atau berpartisipasi dalam acara keagamaan, seperti ibadah Haji dan Umrah atau upacara Bali Krama di Besakih.
- h. Pariwisata bahari (*marine tourism*), yang merupakan jenis pariwisata yang menekankan olahraga air seperti berenang, menyelam, memancing, dan lainnya yang didukung oleh tempat penginapan, tempat makan, dan minum.

Berdasarkan klasifikasi jenis pariwisata, Desa Wisata Kalongan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, jika dilihat dari letak geografisnya, Desa Wisata Kalongan termasuk dalam pariwisata lokal (*local tourism*) karena kegiatan

wisatanya masih berfokus pada wilayah yang relatif sempit dan terbatas, yakni di lingkup desa dan sekitarnya. Kedua, ditinjau dari pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, pariwisata di desa ini termasuk dalam kategori pariwisata aktif (*inbound tourism*), sebab mampu menarik kunjungan wisatawan dari luar daerah yang memberikan kontribusi ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Ketiga, apabila dikaji dari objek wisatanya, Desa Wisata Kalongan dapat dikategorikan sebagai pariwisata budaya (*cultural tourism*) karena daya tarik utamanya terletak pada kekayaan seni, tradisi, dan budaya lokal yang menjadi ciri khas dan daya pikat utama bagi para pengunjung.

1.7.7 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata, menurut Pebriyanti (2020) dalam Annatasya Yunita Nugroho dan Amni Zarkasyi Rahman (2022), adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap atau tindakan strategis yang dilakukan secara metodis untuk mencapai tujuan pembangunan dan tujuan pariwisata yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pertumbuhan pariwisata bukan hanya tentang menarik lebih banyak pengunjung; tetapi juga tentang bekerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan. Pengembangan pariwisata, menurut Paturusi (2001), adalah taktik yang digunakan untuk mempromosikan, mengembangkan, dan meningkatkan kondisi pariwisata di suatu lokasi atau objek wisata tertentu guna menarik wisatawan serta memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan serta mengoptimalkan

potensi yang dimiliki desa, yang mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk wisata, kegiatan promosi, serta pelaksanaan kampanye sadar wisata agar mampu meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut.

Pengembangan pariwisata, menurut Oka A. Yoeti (2002), adalah upaya yang disengaja dan direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan penawaran pariwisata yang ada saat ini sekaligus memperkenalkan kategori produk baru untuk produksi atau pemasaran. Sementara itu, menurut Soetomo (2001) dalam Suwarti (2017), pengembangan pariwisata dipahami sebagai suatu proses yang bersifat dinamis, yang menatap masa depan dan dirancang untuk menghadapi tantangan serta meningkatkan kemampuan sektor pariwisata. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga mempersiapkan strategi untuk menjawab kebutuhan dan peluang di masa depan.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, pengembangan pariwisata dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil untuk meningkatkan standar pariwisata di suatu destinasi atau objek wisata dengan tujuan memberikan manfaat. Lebih lanjut, Yoeti (2022) menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata, perlu memperhatikan lima aspek utama, yaitu:

1. *Traveler* (turis)
2. *Transportation* (transport)
3. *Attraction* (Atraksi)
4. Fasilitas Pelayanan

5. Informasi dan promosi

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, destinasi wisata adalah suatu wilayah geografis tertentu dalam satu atau beberapa wilayah administrasi di mana kegiatan pariwisata didukung oleh fasilitas umum yang saling terkait, obyek wisata, infrastruktur pariwisata, aksesibilitas, dan keterlibatan masyarakat. Cooper et al. (1997) menyatakan bahwa suatu lokasi wisata perlu memiliki empat elemen penting agar dapat memaksimalkan potensi wisatanya. Selain itu, Yoeti (2002) menyampaikan beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam upaya pengembangan pariwisata, yaitu:

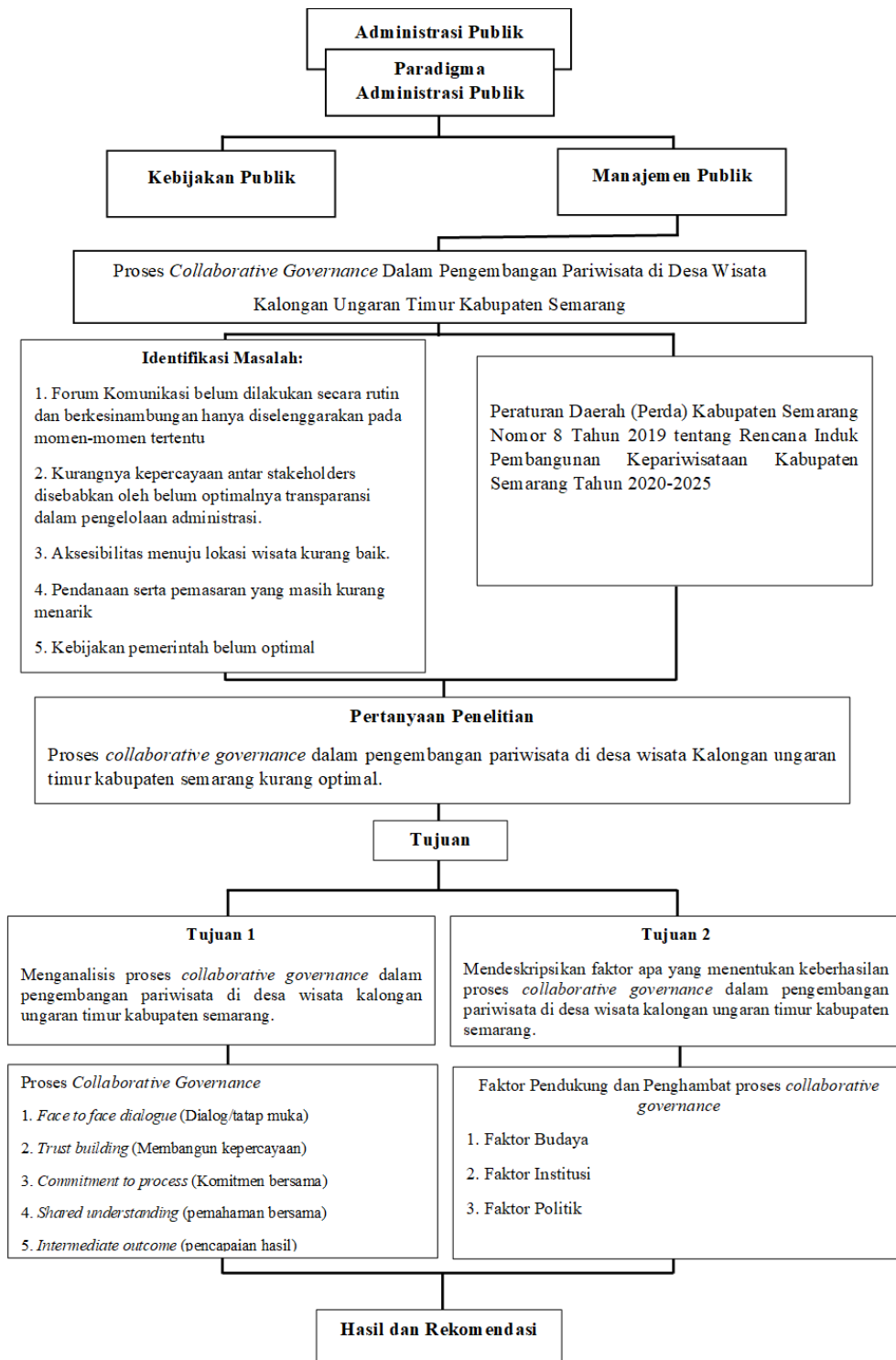
1. *Atraksi*: Segala sesuatu yang bisa dilihat atau dinikmati wisatawan melalui acara atau pertunjukan khusus. Wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan manusia adalah tiga kategori tempat wisata tersebut.
2. *Aktivitas*: berbagai bentuk suatu kegiatan dimana dilakukan di kawasan wisata yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, kesenangan, dan hiburan bagi pengunjung.
3. *Aksesibilitas*: fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan yang memudahkan wisatawan untuk mencapai dan memasuki kawasan wisata.
4. *Amenitas*: fasilitas penunjang fisik yang disediakan oleh pengelola atau pelaku wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung.

Menurut Pearce dalam (Suwarti, 2017) mengembangkan potensi pariwisata ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Iklim, kondisi cuaca menjadi faktor dimana penentu dalam pengembangan pada pariwisata karena dapat memengaruhi:
 - a. Daya tarik suatu objek wisata.
 - b. Pelaksanaan aktivitas pariwisata.
 - c. Desain dan bentuk bangunan yang sesuai dengan kondisi cuaca.
2. Kondisi fisik:
 - a. Ketersediaan ruang yang memadai untuk pembangunan gedung dan fasilitas infrastruktur pariwisata.
 - b. Kemudahan akses menuju lokasi yang dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mengurangi biaya pembangunan..
3. Daya tarik wisata.
4. Akses.
5. Sewa dan tata guna lahan.
6. Faktor lain, aspek tambahan yang perlu diperhatikan sesuai karakteristik destinasi wisata:
 - a. Manusia, juga sebagai pelaku utama yang menjalankan kegiatan pariwisata.
 - b. Tempat, yaitu unsur fisik yang menjadi lokasi dan ruang kegiatan wisata.
 - c. Waktu, mencakup durasi perjalanan wisata dan lamanya pengunjung berada di tempat tujuan.

Dalam penelitian ini pengembangan pariwisata akan dilihat dari 4 (empat) aspek dalam pengembangan pariwisata yakni atraksi, aktivitas, aksesibilitas, dan amenitas.

1.7.8 Kerangka Befikir Peneliti



Sumber: Diolah penulis, 2025

1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Proses *Collaborative Governance*

Proses *collaborative governance* merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan menekankan tahapan dialog langsung, pembangunan kepercayaan, serta pertukaran pemahaman antar pihak. Proses kolaborasi ini mencakup sejumlah gejala atau indikasi yang muncul selama interaksi antar pemangku kepentingan, yang mencerminkan tingkat partisipasi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan bersama. Proses kolaborasi terdiri dari gejala:

1. Dialog tatap muka berfungsi sebagai tempat untuk diskusi perencanaan dan alokasi sumber daya serta sebagai saluran komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan tujuan membina saling pengertian, kepercayaan, dan komitmen terhadap proses kolaboratif. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:
 - a) Apakah terdapat *stakeholders* yang terlibat.
 - b) Ada tidaknya komunikasi antar *stakeholders*.
2. Membangun Kepercayaan adalah proses dinamis dalam mengembangkan rasa saling percaya sehingga antar *stakeholders* dapat saling terbuka dalam proses kolaborasi dengan memperhatikan waktu yang tepat dalam menumbuhkan kepercayaan secara efektif. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:
 - a) Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi antar *stakeholders*.

- b) Waktu yang dibutuhkan dalam membangun kepercayaan.
 - c) Ada tidaknya upaya mengembangkan rasa saling percaya antar *stakeholders*.
- 3. Komitmen Terhadap Proses adalah proses yang mengacu pada rasa saling memiliki agar tetap terlibat serta kesediaan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam proses kolaborasi sesuai kesepakatan agar nantinya dapat mencapai sebuah tujuan bersama yang juga telah ditetapkan. Gejala dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:
 - a) Ada tidaknya rasa saling memiliki.
 - b) Adanya ketepatan dalam membangun kepercayaan.
 - c) Adanya kesepakatan.
 - d) Kesediaan tanggungjawab.
- 4. Pemahaman Bersama adalah pembentukan dan pengembangan pemahaman persepsi bersama akan nilai-nilai kolaborasi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:
 - a) Ada tidaknya pembentukan dan pemahaman nilai bersama.
 - b) Misi dan tujuan yang jelas dalam kolaborasi.
- 5. Hasil Sementara adalah hasil nyata atau pencapaian pertama yang muncul selama proses kolaboratif dan memengaruhi kolaborasi yang sedang berlangsung. Hal ini mencakup rencana strategis, data atau fakta, serta umpan balik terhadap hasil yang telah dicapai. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Pembentukan rencana strategis.
- b) Evaluasi hasil.
- c) Ada tidaknya dampak.

1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance*

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses *collaborative governance* adalah berbagai kondisi, elemen, atau dinamika yang secara langsung memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi antara aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan atau program bersama. Faktor pendukung dan penghambat terdiri dari gejala:

1. Faktor Budaya adalah budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi fleksibel dan menghargai kerja sama lintas sektor menjadi faktor pendukung kolaborasi. Sebaliknya budaya yang terlalu birokratis konservatif dan enggan menghadapi ketidakpastian dapat menghambat proses kolaboratif.

Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Keharmonisan dalam kolaborasi.
 - b) Loyalitas dalam pelaksanaan program.
 - c) Partisipasi dalam kolaborasi.
2. Faktor Institusi adalah struktur institusi yang mendukung dialog horizontal akuntabilitas dan pertukaran informasi mempermudah terjalinnya kolaborasi. Namun struktur hierarkis yang kaku serta ketergantungan pada prosedur formal dapat menghambat adaptasi dan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:
 - a) Alokasi anggaran yang memadai.

- b) Partisipasi dan keterlibatan publik.
 - c) Keberadaan SOP sebagai acuan kolaborasi.
3. Faktor Politik adalah dukungan politik yang stabil dan kepemimpinan yang inovatif mendorong terciptanya sinergi antar aktor. Sebaliknya konflik kepentingan perubahan agenda politik serta kurangnya visi kepemimpinan dapat menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:
- a) Transparansi dalam proses kolaborasi.
 - b) Kekuatan politik dan intervensi *stakeholders*.
 - c) Inovasi dan komitmen dari *stakeholders*.

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Proses Kolaborasi	Dialog Tatap Muka	1. Siapa saja <i>stakeholders</i> yang terlibat. 2. Ada tidaknya komunikasi dan koordinasi antar <i>stakeholders</i>
2.		Membangun Kepercayaan	1. Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi antar <i>stakeholders</i> . 2. Waktu yang dibutuhkan dalam membangun kepercayaan. 3. Ada tidaknya upaya mengembangkan rasa saling percaya antar <i>stakeholders</i> .
3.		Komitmen Terhadap Proses	1. Ada tidaknya rasa saling memiliki. 2. Adanya ketepatan dalam membangun kepercayaan. 3. Adanya kesepakatan. 4. Kesiediaan tanggungjawab.
4.		Pemahaman Bersama	1. Ada tidaknya pembentukan dan pemahaman nilai bersama. 2. Misi dan tujuan yang jelas dalam kolaborasi.
5.		Hasil Sementara	1. Pembentukan rencana strategis. 2. Evaluasi hasil. 3. Ada tidaknya dampak.
1.	Faktor pendukung dan penghambat	Faktor Budaya	1. Keharmonisan dalam kolaborasi. 2. Loyalitas dalam pelaksanaan program. 3. Partisipasi dalam kolaborasi.
2.		Faktor Institusi	1. Alokasi anggaran yang memadai. 2. Partisipasi dan keterlibatan publik. 3. Keberadaan SOP sebagai acuan kolaborasi.
3.		Faktor Politik	1. Transparansi dalam proses kolaborasi. 2. Kekuatan politik dan intervensi <i>stakeholders</i> . 3. Inovasi dan komitmen dari <i>stakeholders</i> .

Sumber: Diolah penulis (2025)

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minat peneliti untuk memahami penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan di Ungaran Timur, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.. Akan tetapi, pada kenyataannya ditemukan beberapa indikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan kolaborasi antar *stakeholders*. Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa *collaborative governance* yang sedang berlangsung belum mencapai potensi maksimalnya, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Model *collaborative governance*, menurut Ansell dan Gash (2008), dapat dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada keberhasilan atau kegagalan dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan di Ungaran Timur. Hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana proses *collaborative governance* diterapkan dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan di Ungaran Timur, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata tersebut. Dari rumusan masalah ini, diharapkan penelitian akan memberikan jawaban terhadap kendala-kendala yang muncul dalam praktik *collaborative governance* yang belum optimal dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan di Ungaran Timur.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada prosedur pelaksanaan penelitian yang mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan, jangka waktu, sumber data atau informasi, serta teknik pengumpulan hingga pengolahan data yang diperoleh. Perancangan

penelitian berperan penting dalam menentukan metode yang sesuai agar mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait topik yang diteliti.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan memahami data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan subjek yang sedang diselidiki. Prosesnya meliputi pelaksanaan wawancara, penyusunan prosedur, pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi makna dari data yang diperoleh (Creswell, 2013). Menurut Royce Singleton (1988) dalam kutipan Somantri (2005), metode kualitatif merupakan pendekatan yang senantiasa berkembang sebagai respons terhadap upaya memahami makna dari fenomena sosial dan realitas yang ada. Oleh karena itu, peneliti turut terlibat secara aktif dalam memperdalam pemahaman sosial dan menjalin pertukaran informasi yang bersifat interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut, dengan harapan dapat menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.

1.9.2 Situs Penelitian

Moleong (2010) menjelaskan lokus penelitian berkaitan dengan wilayah lokasi penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan nama hierarki wilayahnya. Untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan, peneliti akan melakukan

observasi langsung terhadap kondisi nyata objek yang diteliti di lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Wisata Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, sejalan dengan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya.

1.9.3 Subjek Penelitian

Individu atau kelompok yang berperan sebagai informan dan mampu memberikan rincian yang relevan tentang fenomena yang sedang diteliti disebut subjek penelitian. Pengambilan sampel purposif, yang merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan relevansi yang diperlukan terhadap data yang dikumpulkan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih akurat (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, subjeknya adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam proses *collaborative governance* pada pengembangan Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur, antara lain:

1. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Kalongan
2. Kepala Desa Kalongan
3. Kepala BUMDes Kalongan
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
5. Masyarakat Desa Kalongan

1.9.4 Jenis Data

Sugiyono (2023) membedakan jenis data antara dua kategori data: kuantitatif dan kualitatif. Sementara data kualitatif terdiri dari kata-kata, gambar, atau simbol yang tidak dapat diukur, data kuantitatif dinyatakan dalam angka dan

dapat diukur secara matematis. Informan terpilih diwawancarai untuk mengumpulkan data kualitatif yang juga digunakan dalam penelitian tersebut. Kategori data kualitatif berikut digunakan dalam penelitian ini mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang meliputi:

- a. Data tertulis, yaitu berbagai dokumen seperti peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- b. Data gambar, berupa foto-foto yang menggambarkan kondisi dan aktivitas nyata di lapangan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis.
- c. Data statistik, meliputi tabel, diagram, atau grafik yang berisi informasi pendukung mengenai aspek-aspek pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kalongan.
- d. Data berupa kata-kata dan tindakan informan adalah hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Kalongan. Selain itu, data ini juga mencakup temuan yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan.

1.9.5 Sumber Data

Lofland (dalam Moleong, 2010) menegaskan bahwa pengamatan langsung peneliti terhadap tindakan atau perilaku di lapangan, serta dokumen pendukung seperti dokumen dan sumber lainnya, semuanya merupakan contoh sumber data dalam penelitian kualitatif. Data untuk penelitian ini berasal dari dua jenis sumber yang berbeda, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber lapangan. Data primer untuk penelitian ini berasal dari pengamatan langsung terhadap penerapan *collaborative governance* dalam perkembangan Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur, serta wawancara dengan narasumber yang relevan. Pernyataan, opini, dan pengalaman narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian membentuk informasi yang dikumpulkan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang melengkapi data utama dan dikumpulkan dari sumber tidak langsung. Informasi ini dapat berasal dari catatan tertulis, arsip, buku, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Dokumen-dokumen terkait pengembangan desa wisata.
- b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, serta Badan Pusat Statistik.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data diperlukan agar informasi yang diperoleh relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi atau perilaku objek penelitian, sekaligus mencatat hal-hal penting yang ditemukan selama pengamatan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Wisata Kalongan, Ungaran Timur tanpa terlibat secara aktif dalam aktivitas yang diamati. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata. Hasil dari observasi mencakup gambaran situasi, kegiatan, objek, serta fakta-fakta yang terlihat langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk menggali informasi secara mendalam melalui interaksi antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, diterapkan wawancara semi-terbuka dengan narasumber yang dipilih berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan data. Menurut Sugiyono (2023), wawancara semi-terbuka bersifat fleksibel, di mana peneliti tidak menggunakan daftar pertanyaan secara lengkap, melainkan hanya mengikuti poin-poin topik utama yang ingin ditelusuri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Memeriksa berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek studi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data. Dokumen-dokumen ini dapat diberikan oleh partisipan penelitian atau pihak lain. Catatan tertulis, foto, arsip, laporan, atau artikel tentang perkembangan Desa Wisata Kalongan adalah

beberapa contoh formatnya. Peneliti dapat menggunakan teknik ini untuk mendukung dan memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

1.9.7 Analisis Intepretasi Data

Pemrosesan dan pengaturan informasi secara metodis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Prosedur ini melibatkan pengklasifikasian data, membaginya menjadi unit informasi, mengenali tren baru, mengorganisir data yang relevan, dan sampai pada kesimpulan yang mudah dipahami. Metode analisis interaktif diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023), proses menganalisis data kualitatif bersifat berkelanjutan dan saling terkait hingga dianggap selesai. Analisis data ini dalam penelitian tersebut, yaitu:

1. Reduksi Data

Proses mengorganisir dan menyaring informasi untuk menyoroti elemen-elemen yang dianggap penting berdasarkan fokus penelitian dikenal sebagai reduksi data. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, rekaman audiovisual, wawancara, dan observasi. Tujuan dari fase ini adalah untuk mendukung prosedur pengumpulan data berikutnya sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas. Melalui proses pemilihan, pengklasifikasian, dan pengaturan data yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Kalongan dalam kerangka *collaborative governance*, data yang dikumpulkan akan diperiksa dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan.

2. ATLAS.ti

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan perangkat lunak ATLAS.ti sebagai alat bantu dalam menganalisis data kualitatif agar hasil penyajian data lebih teratur dan mudah dipahami. ATLAS.ti berfungsi untuk mengelola serta memberi kode pada data yang telah dikumpulkan, sehingga proses analisis menjadi lebih sistematis, efisien, dan terstruktur. Melalui software ini, berbagai jenis data seperti rekaman audio, video, gambar, maupun data teks (seperti hasil survei dan transkrip wawancara) dapat dianalisis secara mendalam dan terorganisir.

3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui deskripsi teks, namun bisa juga meliputi tabel, diagram, grafik, atau bentuk visual lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami hasil temuan serta merencanakan langkah berikutnya berdasarkan informasi dari yang diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal dibuat berdasarkan data valid yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan seringkali berkembang seiring berjalannya proses penelitian. Setelah seluruh data terkumpul dan disajikan, peneliti akan menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh akan menggambarkan pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan adalah langkah pertama dalam tiga langkah yang saling terkait dari analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan.

1.9.8 Kualitas Data

Menurut Abdussamad (2021), dalam penelitian kualitatif, untuk menjaga prinsip objektivitas diperlukan penerapan triangulasi. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber informasi berbeda untuk memastikan keakuratan data. Proses ini melibatkan verifikasi kebenaran informasi dengan membandingkan hasil dari beberapa metode pengumpulan serta dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan memperhatikan aspek validitas. Menurut Sugiyono (2017), validitas merujuk pada tingkat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi nyata objek penelitian serta kesesuaian dengan laporan yang dibuat peneliti. Dengan kata lain, data dianggap valid apabila temuan peneliti sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk memastikan data tersebut sah. Untuk meningkatkan ketepatan data, strategi ini diterapkan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik. Moleong (2010) menyatakan bahwa metode triangulasi berikut digunakan:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data dari hasil wawancara.
2. Membandingkan pernyataan yang disampaikan secara terbuka dengan pernyataan yang diberikan secara pribadi.
3. Membandingkan pendapat informan mengenai kondisi lapangan dengan informasi yang diberikan oleh pihak terkait dalam periode waktu penelitian.
4. Membandingkan data wawancara dengan dokumen atau catatan relevan